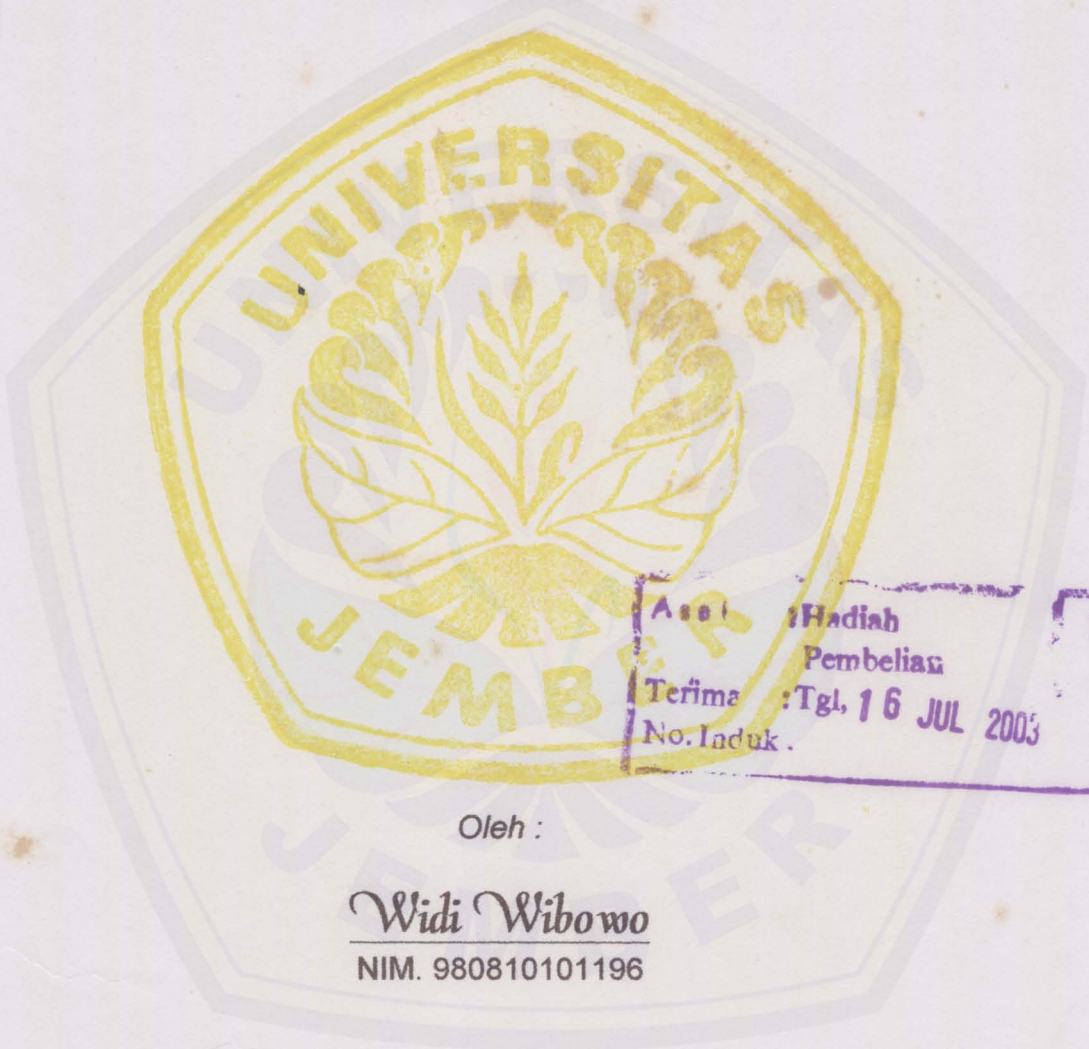


ANALISIS PENGARUH KOTA TERHADAP PERKEMBANGAN
HINTERLAND DI KABUPATEN PONOROGO



SKRIPSI



Asal : Hadiah
Pembelian
Terima : Tgl, 16 JUL 2003
No. Induk.
Klass
338
Wib
a

Oleh :

Widi Wibowo

NIM. 980810101196

FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2003

**ANALISIS PENGARUH KOTA TERHADAP
PERKEMBANGAN HINTERLAND
DI KABUPATEN PONOROGO**

SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat guna memperoleh
Gelara Sarjana Ekonomi
Universitas Jember**

Oleh

Widi Wibowo

NIM 980810101196

**FAKKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS JEMBER
2003**

JUDUL SKRIPSI

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

N a m a : Widi Wibowo

N. I. M. : 980810101196

Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

telah dipertahankan di depan Panitia Penguji pada tanggal :

28 Juni 2003

dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima sebagai kelengkapan guna memperoleh gelar S a r j a n a dalam Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Jember.

Susunan Panitia Penguji

Ketua,

Dr M Salah, MSc

NIP. 131 471 212



Sekretaris,

Drs Urip Muharso

NIP. 131 120 333

Anggota

Drs J Sugiarto, SU

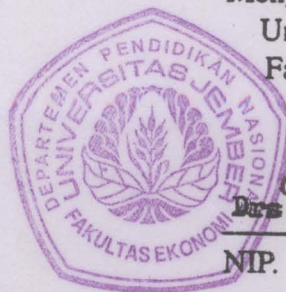
NIP. 130 610 494

Mengetahui/Menyetujui
Universitas Jember
Fakultas Ekonomi

Dekan,

Drs Lisep, SU

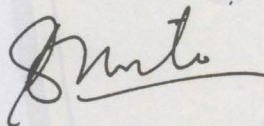
NIP. 130 531976



TANDA PERSETUJUAN

Judul Skripsi : Analisis Pengaruh Kota Terhadap Perkembangan
Hinterland di Kabupaten Ponorogo
Nama Mahasiswa : Widi Wibowo
NIM : 980810101196
Jurusan : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan
Konsentrasi : Ekonomi Perencanaan dan Industri

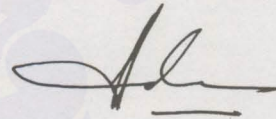
Pembimbing I



Drs J Sugiarto, SU

NIP. 130610494

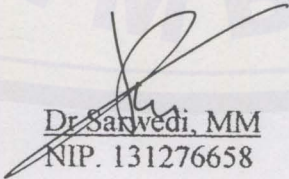
Pembimbing II



Drs M Adenan, MM

NIP. 131996155

Ketua Jurusan

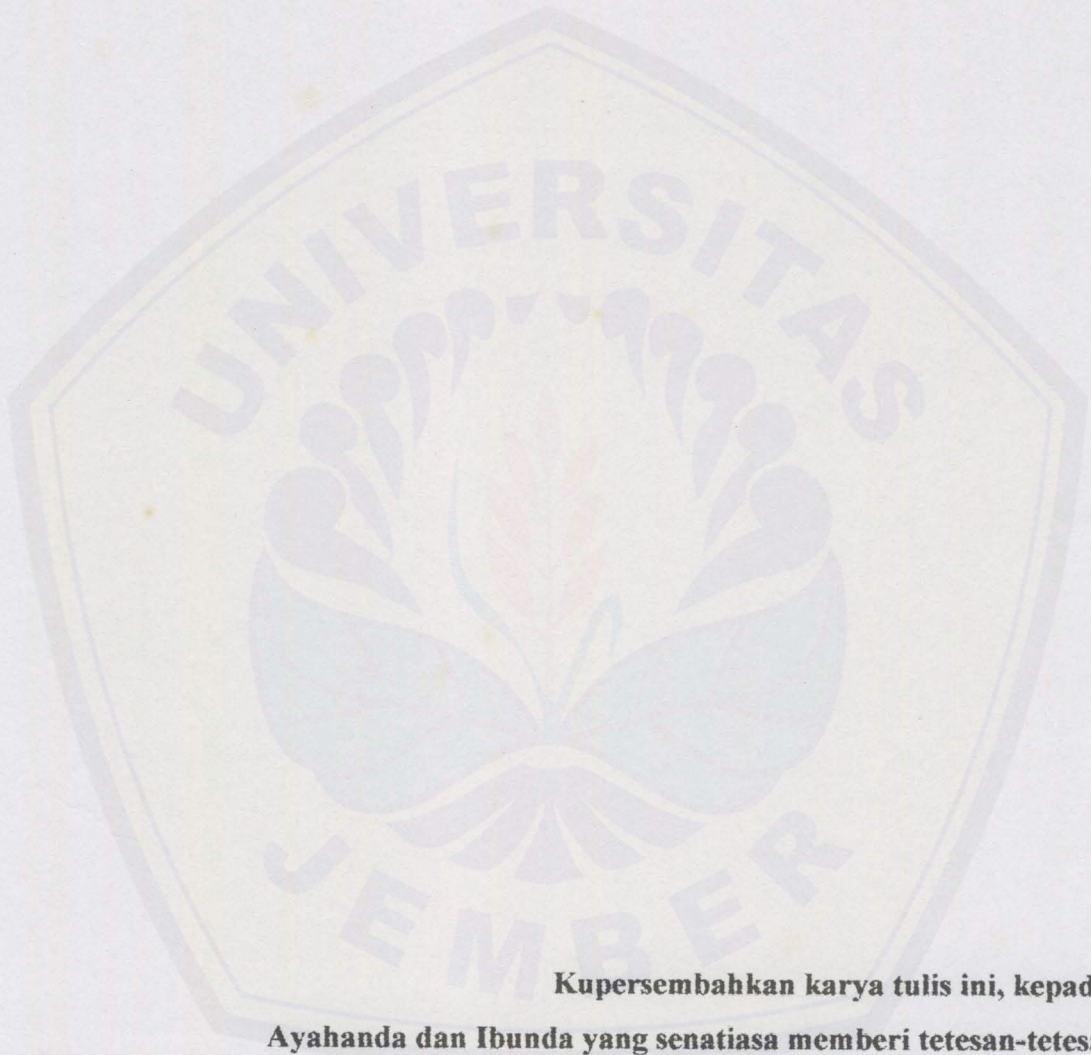


Dr Sarwedi, MM

NIP. 131276658

Tanggal Persetujuan : Mei 2003

LEMBAR PERSEMBAHAN



**Kupersembahkan karya tulis ini, kepada:
Ayahanda dan Ibunda yang senantiasa memberi tetesan-tetesan
dari samudera do'a dan kasih sayang
Kakak semata wayang,
dari siapa aku memperoleh cerminan hidup**

MOTTO

**Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang
(Al Qur'an)**

Selama aku mempelajari hal yang baru setiap hari, walau hanya satu kata, satu ide, atau satu hikmah, (berarti) aku menunaikan kewajiban Tuhanku. Maka aku hidup kini jika tidak maka aku tiada
(Widi)

Sekalipun hari-hari lalu hanya mimpi dan hari esok adalah bayangan
Akan tetapi,
Jika kita lalui hari ini dengan tangan tengadah disertai dengan tetesan air mata dan curahan keringat
Maka
Mimpi akan lebih indah dan hari esok akan penuh harapan
(W Wibowo)

**Yakin Usaha Sampai
(Hymne)**

ABSTRAKSI

Penelitian ini berjudul: “Analisis Pengaruh Kota Terhadap Perkembangan Hinterland di Kabupaten Ponorogo”. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya pengaruh kota tersebut terhadap hinterlandnya. Penelitian ini menggunakan metode *explanatori* dengan data sekunder yang di kutib dari Badan Pusat Statistik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo dan studi literatur.

Metode analisa yang digunakan adalah indeks Williamson yaitu untuk mengetahui kesenjangan antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya. Indeks Gravitasi, untuk mengetahui tingkat interaksi ruang antara dua wilayah yang dipisahkan oleh jarak.

Tingkat interaksi antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan. Kesenjangan antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya juga relatif kecil.

Kesimpulan yang dapat ditarik adalah semakinn besar nilai gravitasi dari pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya hal ini menunjukkan bahwa sarana-sarana yang ada di pusat sub eilayah pembangunan digunakan oleh hinterlandnya, sementara kesenjangan antara pusat sub wilayah dengan hinterlandnya semakin menyempit.

Kata kunci: pusat sub wilayah, hinterland, dan kesenjangan.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan nikmat, rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi.

Penulisan skripsi dengan judul “Analisis Pengaruh Kota Terhadap Perkembangan Hinterland di Kabupaten Ponorogo” dapat penulis selesaikan dengan mendapatkan bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan terima kasih kepada:

1. Drs J Sugiarto, SU dan Drs M Adenan, MM atas bimbingan dan arahnya.
2. Seluruh staf edukasi dan administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Jember.
3. Seluruh pimpinan dan karyawan Badan pusat Statistik dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo.
4. **Bapa, Bunda, dan Kakak yang telah memberikan do'a dan motivasi.**
5. E.M Hamdiana (FE Unair) *atas segalanya*, F Ananta *atas persahabatan dan bantuannya*, adikku D Restikawati (Fateta IPB) *atas kiriman literatur, jurnal dan perhatiannya*.
6. Rekan-rekan yang telah “meninggalkanku” E Sugiarto, A.D Cahyadi, Yoyok, I Murtopo dan P Novianti *kesemuanya atas keceriaan dan bantuannya penulisan*.
7. Kawan-kawanku SPGP '98 dan kawan-kawan konsentrasi ekonomi perencanaan dan industri *atas kebersamaannya*.
8. Sahabat-sahabatku dari HMI Komisariat Ekonomi *atas nuansanya*.
9. Teman-teman kostku (Farid, mas Toton, Fajar, dan Aji), Bu Sutikno, mbak Yeni, mas Heri *atas kesempatannya*.
10. Vanny Comp (Widi dan Afit) dan semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.

Besar harapan bahwa skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi pihak-pihak yang memerlukannya.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN ABSTRAKSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	
I. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Perumusan Masalah.....	7
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1. Tinjauan Penelitian Sebelumnya.....	9
2.2. Landasan Teori.....	10
2.3. Hipotesis.....	21
III. METODE PENELITIAN	
3.1. Rancangan Penelitian.....	22
3.2. Metode Pengambilan Sampel.....	22
3.3. Metode Pengambilan Data.....	23
3.4. Metode Analisa Data.....	23
3.5. Definisi Operasional Variabel.....	25
IV. PEMBAHASAN	
4.1. Gambaran Umum Daerah Penelitian.....	27
4.2. Analisa Data.....	34
4.3. Pembahasan.....	37

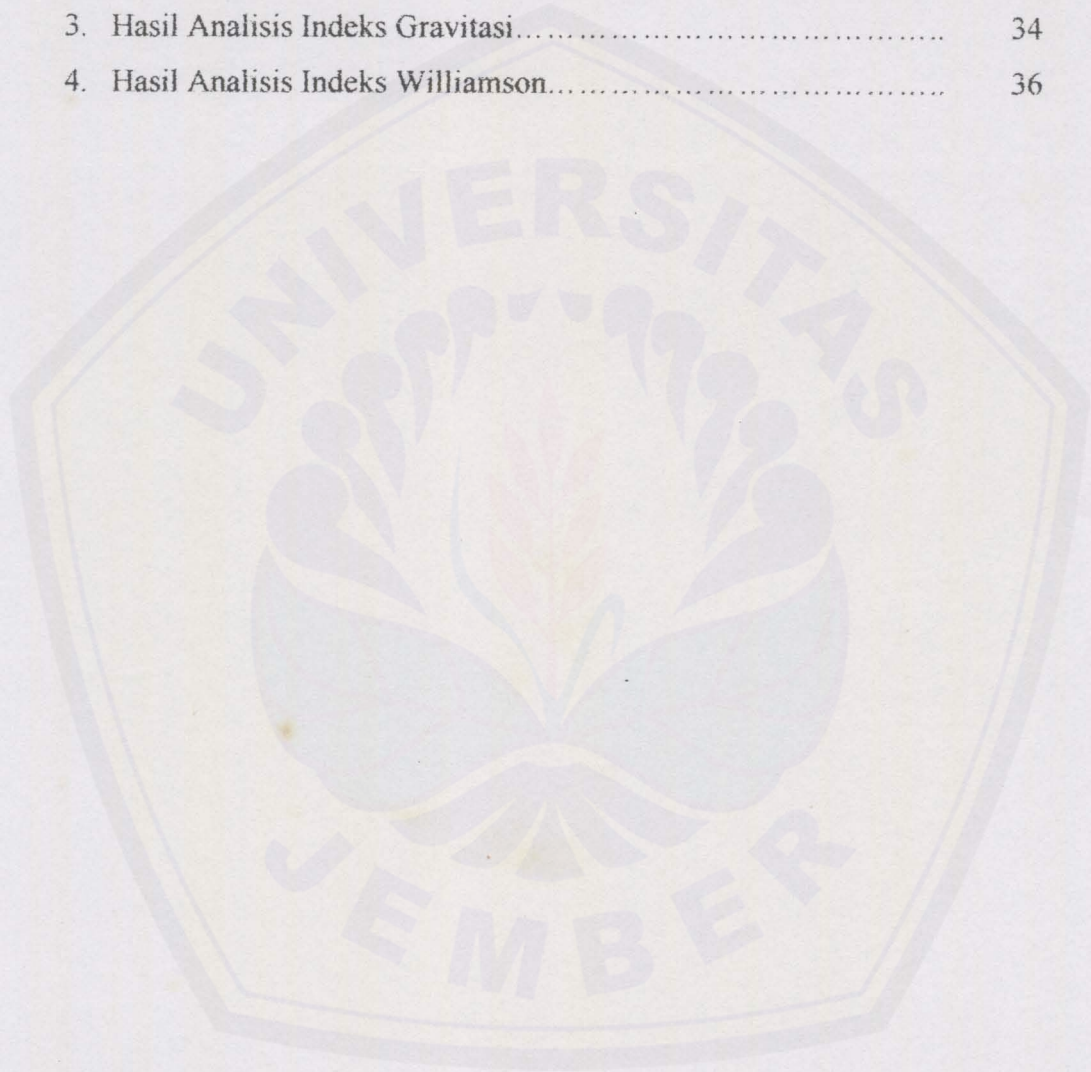
V. SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan.....	41
5.2. Saran.....	42



DAFTAR TABEL

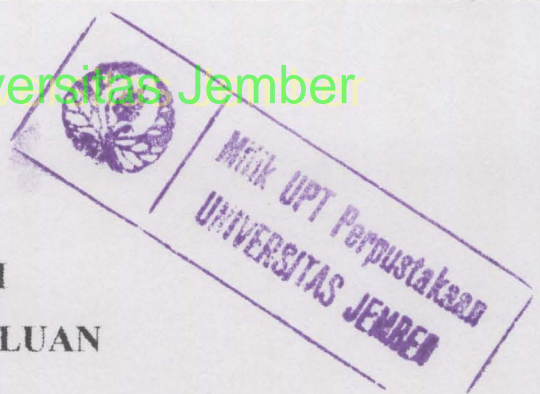
No.	Judul	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut Jenis Kelamin, Sex Ratio, dan Kecamatan Tahun 2001.....	29
2.	Luas Wilayah, Penduduk, Kepadatan 2001.....	30
3.	Hasil Analisis Indeks Gravitasi.....	34
4.	Hasil Analisis Indeks Williamson.....	36



DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Hirarki Perencanaan Daerah.....	20





BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pembangunan adalah suatu hal yang pasti dan harus dilaksanakan seluruh negara di dunia. Akan tetapi ada perbedaan yang sangat mencolok mengenai pembangunan negara-negara yang sedang berkembang dan negara yang sudah maju. Perbedaannya adalah, jika pada negara-negara maju pada saat sekarang adalah hanya tinggal menyejahterakan masyarakatnya saja. Negara berkembang, pembangunan selain untuk mengejar ketertinggalan juga dengan adanya pembangunan tersebut justru terjadi adanya ketimpangan antara satu daerah dengan daerah yang lainnya.

Menurut Jan Tinbergen (dalam Sanusi 2000:7) menjelaskan dalam sepuluh atau dua puluh tahun (pernyataan sebelum tahun 1973), negara-negara miskin memperlihatkan hasrat berkembang secara ekonomis. Sekalipun hasrat tersebut diperdengarkan oleh pemerintah negara-negara miskin, perasaan serupa juga dijumpai di berbagai golongan dalam masyarakat itu. Tentu saja hasrat untuk membangun adalah wajar dan dapat dipahami karena sebagian besar dari mereka hidup dalam kemelaratan secara fisik mereka sangat menderita sekali, dengan demikian maka terlebih dahulu harus melihat definisi pembangunan. Tujuan akhir dari pembangunan itu adalah suatu kesejahteraan umum. Menurut Sukirno (1985:13) pengertian pembangunan ekonomi pada umumnya didefinisikan sebagai suatu proses yang menyebabkan pendapatan perkapita penduduk suatu masyarakat meningkat dalam jangka waktu yang panjang. Jelas dapat dilihat dari definisi tersebut bahwa pembangunan ekonomi mempunyai tiga sifat penting. Pembangunan ekonomi merupakan: (i) suatu proses yang berarti merupakan perubahan terus menerus, (ii) suatu usaha untuk menaikkan pendapatan perkapita, dan (iii) kenaikan pendapatan perkapita itu terus menerus dalam jangka panjang. Menurut Irawan dan Suparmoko (1987:5) pembangunan ekonomi adalah usaha-usaha untuk meningkatkan taraf hidup suatu bangsa yang sering diukur dengan tinggi rendahnya pendapatan riil perkapita.

Menurut Todaro (2000:15) pengertian ilmu ekonomi istilah pembangunan (*development*) secara tradisional dapat diartikan sebagai suatu kapasitas dari sebuah perekonomian nasional yang kondisi-kondisi awalnya bersifat statis dalam waktu yang cukup lama untuk menciptakan dan mempertahankan kenaikan tahunan. Menurut Todaro (2000:19) tantangan utama dari pembangunan adalah memperbaiki kualitas kehidupan. Di negara-negara miskin, kualitas hidup yang lebih baik memang mensyaratkan adanya pendapatan yang tinggi namun yang dibutuhkan bukan hanya itu. Pendapatan yang tinggi itu merupakan salah satu dari sekian banyak syarat yang harus dipenuhi. Banyak hal yang juga tak kalah pentingnya yang juga harus diperjuangkan yaitu mulai dari pendidikan yang lebih baik, peningkatan standard kesehatan dan nutrisi, pemberantasan kemiskinan, perbaikan lingkungan hidup, pemerataan kesempatan, dan pemerataan individual.

Pembangunan tersebut seharusnya dipandang sebagai sebagai proses multi dimensional yang bukan hanya mengejar kenaikan pertumbuhan ekonomi saja akan tetapi juga pemerataan baik pendapatan, maupun kesempatan, pengentasan kemiskinan juga merupakan hal yang penting. Pembangunan adalah suatu perubahan total pada masyarakat tanpa mengabaikan kepentingan dasar dan keinginan individu maupun kelompok-kelompok sosial yang ada didalamnya untuk mencapai hal yang lebih baik secara material atau spiritual.

Pembangunan yang dilaksanakan di Indonesia pada dasarnya sudah menuai sukses besarnya. Indonesia pada dekade 90-an tidak dapat disamakan dengan Indonesia pada dekade 60-an. Dari awal dekade tersebut rezim yang baru dapat merekayasa pemulihan ekonomi yang luar biasa cepatnya, sebagaimana inflasi yang turun dengan tajam dan pertumbuhan ekonomi yang cepat (Hill 2000:4), akan tetapi terjadi perubahan paradigma pembangunan pada paro kedua dekade 90-an sebagai akibat dilandanya krisis ekonomi. Adanya reformasi pembangunan nasional yaitu dari sentralisasi menjadi desentralisasi yang saat ini sedang hangat-hangatnya digulirkan.

Pada saat sekarang ini desentralisasi bukan lagi merupakan sebuah trend akan tetapi sudah menjadi kebutuhan bagi bangsa Indonesia ini. Sebab bagaimanapun juga

pembangunan yang bersifat sentralisasi sangat merugikan karena dalam hal ini pemerintah pusat belum tentu tahu keinginan dan kebutuhan dari daerah. Selain itu pemerintah daerah hanya menjadi kepanjangan tangan dari pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah tidak mampu mengembangkan daerahnya dengan baik yang pada akhirnya terjadi ketimpangan antara pusat dengan daerah atau antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya. Bahkan jika melihat di belahan dunia yang lain yaitu negara sebesar Uni Sovyetspun runtuh. Hal ini dapat menjadi sejarah masa lalu sentralisasi. Sebuah negara dimana menerapkan sentralisasi yang ketat, selain dapat menimbulkan biaya tinggi juga tidak mampu menjawab tantangan jaman.

Menurut UU No. 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut Faisal Basri dalam (Yudhoyono et al 2000:159) otonomi daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Untuk mewujudkan keadaan tersebut, berlaku proposisi bahwa pada dasarnya segala persoalan diserahkan kepada daerah untuk mengidentifikasi, merumuskan, dan memecahkan kecuali untuk persoalan-persoalan yang tidak mungkin dapat diselesaikan oleh daerah itu sendiri dalam perspektif keutuhan bangsa.

Menurut Emil Salim (dalam Yudhoyono et al 2000:111) ciri yang menonjol dari otonomi daerah adalah otonomi daerah bukan untuk provinsi akan tetapi otonomi daerah kabupaten seperti yang tergambar dalam Undang-Undang sehingga seluruh *resources* jatuh ke kabupaten bukan ke provinsi. Hal ini diperkuat dengan Brodjonegoro (dalam Salim, Emil et al 2002:150-151) sejalan dengan UU No. 22 Tahun 1999 dan UU No. 25 Tahun 1999 tentang otonomi daerah dan perimbangan kekuasaan pusat dan daerah, jelas tingkat pemerintahan yang dimaksud ini adalah tingkat pemerintahan kabupaten atau kota.

Otonomi yang bertanggung jawab adalah berupa pertanggung jawaban berupa konsekwensi pemberian hak dan kewenangan kepada daerah dalam wujud tugas dan

kewajiban yang harus dipikul dalam mencapai tujuan pemberian otonomi berupa peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan kesejahteraan masyarakat semakin baik. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut untuk mendaya gunakan dengan baik agar terjadi kesinambungan, *multiplier effect*, dan *spread effect* dalam pembangunan. Setelah diketahui fungsi dari beberapa kota yang mempunyai skala pelayanan regional maupun sub regional disusunlah konsep perwilayahan. Konsep perwilayahan ini didasarkan pada: pertama adalah hubungan timbal balik yang terjadi antara pusat permukiman dan wilayah sekitarnya, kedua adalah homogenitas wilayah, ketiga adalah ekologi wilayah, dan yang terakhir adalah perwilayahan sektoral (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo 2000: hal II - 2).

Kabupaten Ponorogo yang merupakan bagian integral dari Negara kesatuan Republik Indonesia saat ini sedang mendapatkan otonomi. Otonomi daerah yang saat ini sedang digulirkan merupakan sebuah tantangan yang harus dijawab. Kabupaten Ponorogo harus dapat merealisasikan tuntutan masyarakat. Sehingga otonomi daerah tersebut bukan lagi merupakan sebuah bencana akan tetapi justru menjadi peluang untuk mengembangkan dan mengelola pembangunan daerahnya sendiri.

Fungsi kota dalam semangat desentralisasi adalah: sebagai pusat kegiatan yang memebentuk suatu wilayah pelayanan tertentu (regional beberapa kecamatan) sesuai dengan struktur kota; sebagai simpul jasa distribusi yang mencakup kegiatan komunikasi, perdagangan dan pemasaran (sistem alokasi dan sistem distribusi); sebagai tempat fungsi tertentu berdasarkan kegiatan intensif yaitu sebagai kegiatan sekunder dan tersier; penempatan fungsi kota yang mendukung pengembangan kegiatan yang ada diwilayah hinterlandnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo 2000: hal IV- 4).

Secara umum keadaan ekonomi makro kabupaten Ponorogo dapat dilihat dari pertumbuhan ekonomi selama beberapa tahun yaitu 1998, 1999, 2000, dan 2001 yaitu 2,64 %, 1,18 %, 2,05 %, dan 2,77 %. Dalam upaya untuk mengimbangi pertumbuhan tersebut maka diperlukan juga pemerataan ekonomi yang dengan cara mempercepat pembangaunan ekonomi yang efektif dan kuat dengan memberdayakan potensi

ekonomi daerah yang dimiliki dengan memperhatikan penataan ruang dan lingkungan.

Potensi-potensi yang terdapat di wilayah kabupaten Ponorogo seperti: dari segi potensi ekonomi tersebut sangat potensial untuk diekspor adalah padi, kacang hijau, dan bahkan kelapa memberikan kontribusi yang cukup besar untuk skala Jawa Timur (Regional). Sektor fisik yaitu keberadaan sungai dan anak sungai yang merupakan potensi tata guna air dan sebagian kawasan merupakan kawasan berhutan sehingga keduanya mendatangkan potensi pariwisata, ekologis, dan ekonomis; sektor yang lain adalah potensi sumberdaya manusia yang besar angkatan kerjanya dalam struktur penduduk menurut usia kerja sehingga potensi ini semestinya diimbangi dengan tingkat pendidikan yang memadai dan ketersediaan lapangan kerja yang memadai sehingga menekan angka pengangguran. Sektor terakhir merupakan potensi sarana dan prasarana yang cukup potensial karena Kabupaten Ponorogo karena menghubungkan antara Jawa Timur dengan Jawa Tengah serta Madiun, Trenggalek, Magetan, dan Pacitan (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo 2000: 2000:II-6).

Pembangunan kawasan secara menyeluruh maka diperlukan pengembangan potensi-potensi daerah akan tetapi bagaimanapun juga selain potensi-potensi yang dimiliki dan harus dikembangkan tersebut juga terdapat permasalahan-permasalahan yang harus dipecahkan seperti adanya kesenjangan antara kota dengan desa-desa sekitarnya. Potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Ponorogo pada dasarnya adalah sector pertanian dengan memberikan kontribusi yang cukup besar. Kontribusi tersebut memang cukup besar, akan tetapi prosentasenya menurun terus menerus pada tahun 1998, 1999, dan 2000 adalah 34,95%, 34,37%, dan 34,17%. Sector primer non pertanian yang pertumbuhannya cukup baik dan memberikan peluang sebagai salah satu alternatif penggalan di wilayah Kabupaten Ponorogo namun belum dikelola dengan baik adalah sector pertambangan (Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 2002:38). Pertambangan-pertambangan tersebut jika dikembangkan akan dapat pemeratakan pembangunan karena terletak didaerah-daerah.

Permasalahan kesenjangan terjadi antara kota dengan desa-desa juga antara kota dalam hal ini kecamatan kota dengan wilayah-wilayah yang lainnya, ditandai dengan adanya konsentrasi jumlah SD, SLTP, dan SMU (umum atau kejuruan) baik negeri ataupun swasta: 40 buah dikecamatan kota dan 586 buah tersebar di 19 kecamatan, 12 buah dikecamatan kota dan 68 buah tersebar di 19 kecamatan, 17 buah dikecamatan kota dan 17 buah tersebar di 19 kecamatan. Penyebaran industri juga tidak merata di Kecamatan Ponorogo saja total industri per unit mencapai 979 dan 19.445 tersebar di 19 kecamatan dengan total penyerapan tenaga kerja mencapai 4.839 orang di Kecamatan Ponorogo dan 43.256 orang terserap di 19 kecamatan yang lain.

Data perekonomian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa pengembangan ekonomi tidak harus berada di daerah perkotaan saja mengingat potensi penyumbang PDRB dominan berada di wilayah pedesaan. Kebijakan pengembangan perekonomian diharapkan dapat pula mengembangkan konsep perekonomian yang berbasis kerakyatan, dengan langkah demikian maka upaya pemerataan pembangunan tidak saja terkonsentrasi di daerah perkotaan saja namun dapat terdistribusi secara merata di wilayah pengaruhnya atau hinterlandnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo 2000: II-8).

1.2 Perumusan Masalah

Dengan adanya desentralisasi tersebut maka peran pemerintah sangat diperlukan sebagai katalisator, sehingga diperlukan pengembangan kawasan secara menyeluruh dan bersamaan. Seperti yang diungkapkan Perroux (dalam Spillane 1993:8.14) berpendapat “bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan ekonomi”.

Pembangunan kawasan secara menyeluruh maka diperlukan pengembangan potensi-potensi daerah. Perkembangan wilayah yang tidak merata tersebut maka terdapat kecenderungan terjadinya *primasi* (kesenjangan) pertumbuhan, yang mana tidak terjadinya keseimbangan antar wilayah dalam arti ketidak seimbangan antara pembangunan antara perkembangan wilayah pusat dan wilayah belakangnya sehingga wilayah sekitarnya tidak berkembang. Data perekonomian mengenai konsentrasi lembaga pendidikan, industri dan penyerapan tenaga kerja tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa konsentrasi pengembangan ekonomi tidak harus berada di daerah perkotaan saja mengingat potensi penyumbang PDRB dominan berada di wilayah pedesaan. Kebijakan pengembangan perekonomian diharapkan dapat pula mengembangkan konsep perekonomian yang berbasis kerakyatan, dengan langkah demikian maka upaya pemerataan pembangunan tidak saja terkonsentrasi di daerah perkotaan saja namun dapat terdistribusi secara merata di wilayah pengaruhnya atau hinterlandnya (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ponorogo 2000:II-8). Kota dalam hal ini dituntut untuk dapat menyebabkan *multiplier effect* dan *trickle down effect* atau efek menetes kebawah.

Perumusan masalah penelitian tersebut adalah:

“Sejauh mana kota mempunyai pengaruh terhadap hinterlandnya”.

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui :

1. Mengetahui tingkat interaksi ruang antara dua wilayah
2. Mengetahui tingkat kesenjangan antara dua wilayah

1.3.2 Manfaat

1. sebagai bahan pertimbangan untuk memberikan informasi dan masukan dalam menentukan kebijakan ekonomi terutama kepada pejabat-pejabat Bappeda mengenai tata ruang kota agar dapat menimbulkan *multiplier effect* dan *spread effects*
2. memberikan bahan atau informasi bagi peneliti lain yang mengadakan penelitian dalam bidang sejenis.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Penelitian Sebelumnya

Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Yuliana (1994) dengan judul “Peranan Kutub Pertumbuhan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tingkat II Jember” dengan menggunakan indeks gravitasi dan indeks Williamson. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah:

1. Adanya pusat-pusat Sub Wilayah Pembangunan dalam kebijaksanaan pembangunan perwilayahan di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember, memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pengembangan wilayah Hinterlandnya. Hal ini ditunjukkan dengan semakin besarnya nilai gravitasi dari hinterland ke pusat Sub Wilayah Pembangunan jika jarak hinterland ke pusat Sub Wilayah Pembangunan semakin dekat (Kecamatan Sumberbaru, Gumukmas, Wuluhan, Jenggawah, Pakusari, dan Arjasa). Semakin besar nilai gravitasi dan aksesibilitas dari hinterland ke pusat Sub Wilayah Pembangunan ini menunjukkan bahwa saran-sarana yang tersedia di pusat Sub Wilayah Pembangunan digunakan oleh hinterlandnya dan semakin besar pula fungsi pusat Sub Wilayah Pembangunan sebagai pusat pelayanan bagi daerah sekitarnya.
2. Pusat-pusat Sub Wilayah Pembangunan mempunyai peranan dalam pengembangan wilayah di Kabupaten Daerah Tingkat II Jember. Dari SWP-SWP membentuk kesatuan pengembangan di wilayah Kabupaten Jember, dimana peranan pusat-pusat SWP dalam pengembangan wilayah ditunjukkan oleh kecilnya Indeks Williamson (0,03407-0,675012). Hal ini berarti secara umum tidak terdapat ketimpangan dalam distribusi pendapatan. Adanya Indeks Williamson yang lebih dari 0,5 meskipun masih jauh dari mendekati 1 (Jember Selatan sebelah Utara dan Jember Timur) menunjukkan bahwa sedikit kecenderungan mendekati ketimpangan pendapatan dari daerah itu, yang

kecenderungan mendekati ketimpangan pendapatan dari daerah itu, yang disebabkan karena pusat Sub Wilayah Pembangunannya membawahi daerah hinterlandnya yang jauh itu. Dengan kata lain *spread effectnya* tidak menjangkau pada kecamatan atau hinterland yang jauh dari SWP. *Spread effectnya* hanya mampu menjangkau pada batas-batas tertentu. Hal ini berarti ada jarak maksimum yang berada di bawah pengaruh tempat yang sentral.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Produk Domestik Regional Bruto

Nilai produk yang dihitung dari seluruh sektor yang terdapat di seluruh wilayah (region) apabila dijumlahkan akan membentuk Produk Domestik Bruto (PDRB). Dalam kaitannya dengan PDRB ada beberapa hal yang perlu dipahami dan diketahui:

1. Pengertian PDRB

Produk Domestik Regional Bruto adalah jumlah seluruh nilai tambah produk yang ditimbulkan oleh berbagai sektor atau lapangan usaha yang melakukan kegiatan usahanya disuatu daerah (region) tertentu tanpa memperhatikan pemilikan atas dasar faktor produksi

Oleh karena itu PDRB secara agregatif menunjukkan kemampuan suatu daerah tertentu untuk mendapatkan pendapatan atau balasa jasa kepada faktor-faktor produksi yang ikut berpartisipasi dalam proses produksi di daerah tertentu.

2. Jenis-jenis PDRB

Produk Domestik Regional Bruto secara berkala dapat disajikan dalam dua bentuk, yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan pada suatu tahun dasar, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga yang berlaku adalah semua agregat pendapatan yang dinilai atas harga yang berlaku pada masing-masing tahun, baik pada saat menilai produksi dan biaya antara, maupun pada komponen pengeluaran PDRB

- b. Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan suatu tahun dasar adalah semua agregat pendapatan dinilai atas dasar harga yang terjadi pada tahun dasar. Karena menggunakan harga tetap maka perkembangan harga dari tahun ke tahun semata-mata disebabkan oleh perkembangan riil dari suatu kuantum produksi tanpa mengandung fluktuasi harga.

3. Metode Penghitungan PDRB

Menurut Biro Pusat Statistik (1999:24) pendapatan regional dapat dihitung melalui, yaitu: (1) metode langsung; (2) metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode penghitungan dengan mempergunakan data daerah secara terpisah sama sekali dengan data nasional sehingga hasil perhitungannya memperlihatkan seluruh produk barang dan jasa yang dihasilkan daerah tersebut, sedangkan metode tidak langsung adalah metode perhitungan dengan cara alokasi yaitu dengan cara mengalokasikan pendapatan nasional menjadi pendapatan regional dengan memakai berbagai macam indikator produksi sebagai alokator.

Metode langsung dapat dilakukan dengan mempergunakan tiga macam pendekatan, yaitu:

- a. Pendekatan Produksi

Pendekatan dari segi produksi bermaksud menghitung nilai tambah dari barang dan jasa yang diproduksi oleh seluruh kegiatan ekonomi dengan cara mengurangi biaya antara masing-masing total produk tiap-tiap sektor atau sub sektor. Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan kepada barang dan jasa yang dipakai oleh unit produksi dalam proses produksi dalam input antara

- b. Pendekatan Pendapatan

Dalam pendekatan pendapatan, maka nilai tambah dari setiap kegiatan ekonomi diperkirakan dengan jalan menjumlahkan semua balas jasa faktor produksiyaitu upah dan gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak

langsung neto. Dalam hal sektor pemerintahan dan dalam usaha yang sifatnya mencari keuntungan surplus usaha tidak diperhitungkan.

c. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan dari segi pengeluaran bertitik tolak pada penggunaan akhir barang dan jasa diproduksi dalam negeri. Jadi jika dilihat dari segi penggunaan maka total supply dari barang dan jasa itu digunakan untuk: konsumsi rumah tangga, konsumsi lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan stok, dan ekspor netto

Untuk metode tidak langsung dilakukan dengan metode alokasi pendapatan nasional, yaitu dengan menghitung pendapatan regional dengan cara mengalokasikan pendapatan nasional untuk tiap-tiap daerah dengan menggunakan alokator tertentu. Alokator yang digunakan dapat didasarkan: (a) nilai produk bruto dan neto; (b) jumlah produksi fisik; (c) tenaga kerja; (d) penduduk; (e) alokator tidak langsung.

Dengan menggunakan salah satu atau kombinasi dari alokator tersebut dapat diperhitungkan persentase bagian masing-masing propinsi terhadap nilai tambah secara nasional untuk setiap sektor.

2.2.2 Besarnya Kota dan Pertumbuhan Kota

Menurut para ahli perkotaan, besarnya kota adalah variabel penting yang mempengaruhi pertumbuhan kota. Pemahaman mereka mengenai hubungan diantara kota besar dan pertumbuhan kota diperoleh dalam banyak bentuk. Beberapa ahli memandang kota sebagai lokasi untuk industri. Mereka menyatakan bahwa dengan industrialisasi kota menjadi penting karena faktor ekonomi, karena industri menuntut banyak tenaga kerja dengan bermacam-macam ketrampilan. Lalu faktor-faktor sekunder memperluas fungsi dan besarnya kota, karena konsentrasi penduduk menuntut jasa yang dibutuhkan seperti perumahan, jasa-jasa, sosial, fasilitas pemasaran, dan fasilitas hiburan. Pusat-pusat politik dan ekonomi cenderung bergeser

kekota. Sikap dan aspirasi kota memasuki seluruh lapisan masyarakat. Proses ini dipercepat dengan pengangkutan dan komunikasi yang baik (Spillane 1993:5.18).

Kota itu bukan hanya sebagai suatu organisasi ekonomi saja, dan perkembangan kota tidak dapat dijelaskan hanya oleh faktor ekonomi saja. Kota juga merupakan suatu struktur fisik yang meliputi struktur arsitektur, suatu badan administratif, dan suatu organisasi sosial (Spillane 1993:5.15). lebih lanjut Spillane (1993:5.13) struktur ekonomi kota dianggap terdiri dari dua kategori utama, yang pertama kegiatan dasar yang menghasilkan dan mendistribusikan barang dan jasa yang dikirim keluar daerah perkotaan tersebut, dan yang kedua adalah kegiatan non dasar termasuk barang dan jasa yang dikonsumsi di dalam kota.

Menurut Kadariah (1985:56) besarnya kota ini makin bertambah dengan bertambahnya fungsi kota. Umpamanya, ibu kota nasional memberikan jasa perbankan untuk transaksi internasional kepada semua daerah untuk wilayah nasional, sedangkan beberapa pemusatan daerah menyediakan jasa perbankan dan jasa lainnya kepada masing-masing daerah belakangnya. Jika semua kota itu tersusun mulai dari tingkat yang terkecil sampai tingkat yang terbesar, maka terdapatlah suatu hirarki kota-kota. Pola pemasaran beserta hirarki kota-kota yang ada dipusatnya itu membentuk suatu daerah ekonomi (*economic region*) yang ideal. Dari gambaran diatas dapat disimpulkan, bahwa didataran dengan sumber daya alam dan penduduk yang tersebar merata dapat terjadi kota-kota besar atau kecil.

Ciri yang paling jelas dari perekonomian ruang adalah ketidak homogenannya. Kita dapat melihat bahwa aglomerasi dalam kegiatan ekonomi dan distribusi penduduk pada lokasi-lokasi tertentu. Aglomerasi-aglomerasi ini dapat dilihat terlepas dari apa yang menjadi pusat perhatian kita: didalam perekonomian nasional terdapat daerah yang penduduknya padat, bagiannya dalam kegiatan industri lebih besar dan pandangannya lebih kosmopolitan dari daerah-daerah. Didalam suatu daerah terdapat suatu pusat-pusat yang dominan (pemusatan penduduk dan industri), kearah mana arus penduduk, barang dan jasa, komunikasi dan lalu lintas bergravitasi, bahkan dalam suatu kota pin (*city*) terdapat pusat-pusat (*nuclei*) dimana sebagian

besar usaha dari kegiatan bisnis, komersial dan sosial kota terlaksana, yang terlihat dengan jelas jika misalnya kita melihat pada peta yang menggambarkan kepadatan lalu lintas antar kota (Richardson 2001:59).

Menurut Kadariah (1985:67) perkembangan kota beserta daerah kotanya dapat mempunyai pengaruh timbal balik terhadap daerah belakangnya (hinterland). Pengaruh ini dapat menguntungkan dapat juga merugikan. Pengaruh ini daerah belakang jika kemajuan kota itu merembet keluar seperti pembelian barang-barang hasil daerah belakang. Pengaruh semacam ini akan terjadi jika perekonomian kedua daerah (kota dan daerah belakangnya) adalah komplementer. Disamping komplementaritas itu perekonomian kota dapat memberantas pengangguran terselubung yang terdapat banyak di daerah belakangnya, dengan demikian menaikkan produktivitas marginal tenaga kerja dan tingkat konsumsi masyarakat di daerah belakangnya.

Menurut Christaller (dalam Richardson 2001:83) fungsi utama kota adalah sebagai pusat pelayanan untuk wilayah dibelakangnya, menyuplainya dengan barang dan jasa. Selain itu bahwa pertumbuhan kota tergantung pada spesialisasinya dalam pelayanan perkotaan dimana tingkat pelayanan akan permintaan akan pelayanan perkotaan oleh daerah pelayanannya menentukan kecepatan pertumbuhan kota dan atau tempat pemusatan tersebut. Dengan kata lain, pertumbuhan suatu perkotaan adalah fungsi dari jumlah penduduk dan tingkat pendapatan daerah belakangnya.

2.2.3 Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah

Konsep pengembangan wilayah nasional Indonesia mempunyai tujuan:

1. mewujudkan keseimbangan antar daerah dalam hal tingkat pertumbuhan
2. memperkokoh kesatuan ekonomi nasional
3. memelihara efisiensi pertumbuhan nasional

(Hadjisaroso 1980:1)

Wilayah nasional adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kekuasaan negara. Sedangkan daerah adalah sebutan untuk wilayah dalam batas kewenangan

pemerintah daerah. Dalam pada itu, wilayah nasional selalu habis terbagi-bagi dalam daerah-daerah. Wilayah nasional dan daerah pada dasarnya dapat dikategorikan sebagai hasil tinjauan obyek “dalam kaitannya dengan proses pengaturan pada umamnya.”(Hadjisaroso 1980:9)

Menurut Hadjisaroso (1980:15) proses “berkembangnya wilayah” berlangsung dengan mengikuti mekanisme tertentu, yang disebut dengan mekanisme pembangunan. Pada mekanisme pengembangan dijumpai pula adanya satuan-satuan dan masing-masing disebut satuan mekanisme pembangunan. Satuan wilayah pengembangan disebut dengan nama SWP (Satuan Wilayah Pengembangan) adalah tinjauan obyek “seperti apa adanya” dari “proses berkembangnya wilayah”, yang berlaku untuk satu satuan mekanisme pengembangan. Mengenai pembangunan, pembahasan berkisar pada kegiatan dan hasil-hasilnya. Yang dimaksud kegiatan-kegiatan tersebut, tidak lain adalah berbagai jenis kegiatan, yang tercakup baik dalam sektor pemerintah maupun masyarakat dan dilaksanakan dan diatur dalam rangka usaha-usaha memperbaiki tingkat kesejahteraan hidup masyarakat pada umumnya.

Menurut Hadjisaroso (1980:5) pelaksanaan usaha-usaha peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, tercermin pada pertimbangan skala ekonomis dan pemilihan lokasi yang dinilai paling menguntungkan dalam pemberian pelayanan. Selain itu tercermin pula pada pertimbangan untuk berkelompoknya berbagai kegiatan usaha, sebagai suatu jalan yang menguntungkan dalam memenuhi kebutuhan bersama. Bagi kegiatan usaha penghasil jasa, sebagai lokasi yang dinilai paling menguntungkan adalah lokasi sentral, sesuai dengan ciri-ciri pelayanannya. Sedangkan bagi usaha distribusi, sebagai lokasi yang dinilai paling menguntungkan adalah lokasi ujung, terutama sehubungan dengan jangkauan pelayanannya yang jauh maupun yang orientasinya keluar.

2.2.4 Teori Kutub Pertumbuhan dan Titik Pertumbuhan

Menurut Perroux (dalam Spillane 1993:8.14) berpendapat bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak terjadi secara serentak,

tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan ekonomi.

Menurut Glasson (1977:172) kutub pertumbuhan dan pusat pertumbuhan, konsep-konsep ekonomi dasar dan perkembangan geografiknya dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. konsep "*leading industries*" (industri motrice) dan perusahaan-perusahaan propulsif, menyatakan bahwa pada pusat pertumbuhan terdapat perusahaan-perusahaan propulsif yang besar, yang termasuk dalam "*leading industries*" yang mendominasi unit-unit ekonomi yang lainnya. Lokasi geografik yang asli dari industri-industri seperti itu pada titik fokal tertentu dalam suatu daerah mungkin adalah disebabkan oleh beberapa faktor lokalisasi Sumber Daya Alam, lokalisasi kemanfaatan-kemanfaatan buatan manusia, dan lain-lain. Dalam kenyataan, titik pertumbuhan itu sering kali dicangkokkan pada kerangka tempat-tempat sentral yang ada.
2. Konsep polarisasi menyatakan bahwa pertumbuhan yang cepat dari "*leading industries*" mendorong polarisasi dari unit-unit ekonomi yang lainnya. Kedalam kutub pertumbuhan. Implisit dalam proses polarisasi ini adalah berbagai macam keuntungan aglomerasi. Polarisasi ekonomi ini pasti menimbulkan polarisasi geografik dengan mengalirnya sumber daya ke dan konsentrasi kegiatan ekonomi pada pusat-pusat yang jumlahnya terbatas di suatu daerah.
3. Konsep *spread effect* menyatakan bahwa pada waktunya, kualitas propulsif dinamik dari kutub pertumbuhan akan memencar keluar dan memasuki daerah sekitarnya.

Menurut Myrdal (dalam Tjokroamidjojo 1984:130) bahwa perkembangan yang tidak merata dapat menimbulkan *backwash effect* yaitu menaikkan tenaga dan modal yang diperlukan kepada tempat yang mulai dibangun, sehingga daerah lain dan daerah sekitarnya menjadi mundur dan terbelakang. Segala macam pembangunan

harus ditujukan untuk menimbulkan *spread effect*, yaitu perluasan aktivitas dari pusat pembangunan ekonomi kedaerah lain.

Hirschman (dalam Salim 1991:35) berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi di berbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila di suatu daerah atau wilayah terjadi pembangunan, maka akan terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan disekitar wilayah pembangunan ekonomi itu bermula.

Sementara itu dibagian lain, Myrdal (dalam Jhingan 2000:214) dampak balik dan dampak sebar tidak mungkin berjalan seimbang. Dalam mendukung pendapatnya Myrdal mengutip dua korelasi umum yaitu, yang pertama ketimpangan regional lebih besar di negara miskin daripada di negara kaya, dan yang kedua di negara miskin ketimpangan akan semakin melebar sedangkan di negara kaya semakin menyempit.

Analisis tentang pertumbuhan mengandung hipotesis bahwa pendapatan di daerah pertumbuhan sebagai keseluruhan akan mencapai maksimum apabila pembangunan dikonsentrasikan pada titik pertumbuhan dan daerah pengaruhnya adalah daerah yang penting dalam teori ini. Interaksi ini mempunyai beberapa aspek. Pertama interaksi ini menimbulkan ketidak seimbangan di daerah yang bersangkutan sebagai keseluruhan. Jika titik pertumbuhan digandengkan dengan pembangunan suatu kompleks industri baru, maka kompleks akan ditempatkan disekitar titik pertumbuhan itu sendiri. Pembeneran titik pertumbuhan ini adalah bahwa daerah-daerah ini bagaimanapun juga pasti sampai pada titik-titik stagnasi dan bahwa pengkonsentrasian ekspansi akan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi di daerah yang bersangkutan sebagai keseluruhan. Kedua, industri-industri penggerak di kutub pertumbuhan barangkali industri-industri ekspor yang melayani pasar-pasar ekstra regional. Teori titik pertumbuhan secara implisit bersumber pada konsep basis ekspor tetapi dengan memberinya dimensi ruang, karena industri-industri inti berlokasi pada titik pertumbuhan sedangkan industri-industri penyuplai, tracker, bahan-bahan mentah dan pelayanan-pelayanan independen terpencar-pencar di daerah pengaruh. Ketiga, fungsi-fungsi tempat sentral dari titik pertumbuhan dapat memperjelas hubungan antara titik-titik pertumbuhan dan daerah pengaruhnya

tersedia pelayanan sentral adalah salah satu keuntungan aglomerasi yang penting pada titik pertumbuhan. Titik pertumbuhan dan tempat sentral tidaklah identik perbedaan yang paling menonjol adalah bahwa yang menopang pertumbuhan suatu tempat sentral adalah daerah komplementernya, maka yang menopang pertumbuhan lingkungan pengaruhnya adalah titik pertumbuhan (Richardson 2001:99-100).

2.2.4 Perencanaan Pembangunan Daerah

Menurut Arsyad (1999:107) pengertian daerah dilihat dari aspek ekonomi mempunyai tiga pengertian pertama, daerah homogen adalah suatu daerah yang dianggap sebagai ruang dimana kegiatan ekonomi terjadi dan di dalam berbagai pelosok ruang tersebut terdapat sifat-sifat yang sama. Kesamaan sifat-sifat tersebut antara lain dari segi pendapatan perkapitanya, sosial budayanya, geografisnya, dan lain-lain. Kedua, daerah nodal adalah suatu daerah dianggap sebagai ekonomi ruang yang dikuasai oleh satu atau beberapa pusat kegiatan ekonomi. Ketiga, daerah perencanaan atau daerah administrasi adalah suatu daerah adalah suatu ekonomi ruang yang berada di bawah satu administrasi tertentu seperti satu propinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya.

Pembangunan ekonomi daerah (Arsyad 1999:108) adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan masyarakatnya mengelola sumberdaya-sumberdaya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan antara pemerintah daerah dengan sektor swasta untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang kegiatan ekonomi (pertumbuhan ekonomi) dalam wilayah tersebut. Masalah pokok dalam pembangunan daerah tersebut adalah terletak pada penekanan terhadap kebijakakebijakan pembangunan yang di dasarkan pada kekhasan daerah yang bersangkutan (*endogeneous developmnet*) dengan menggunakan potensi sumber daya manusia, kelembagaan, dan sumber daya fisik secara lokal (daerah).

Menurut Glasson (1977:20) perencanaan telah diidentifikasi sebagai suatu proses pemecahan persoalan yang berorientasi pada persoalan yang akan datang yang dapat diklasifikasikan dengan berbagai cara. Dalam hal ini ada dua pandangan yang

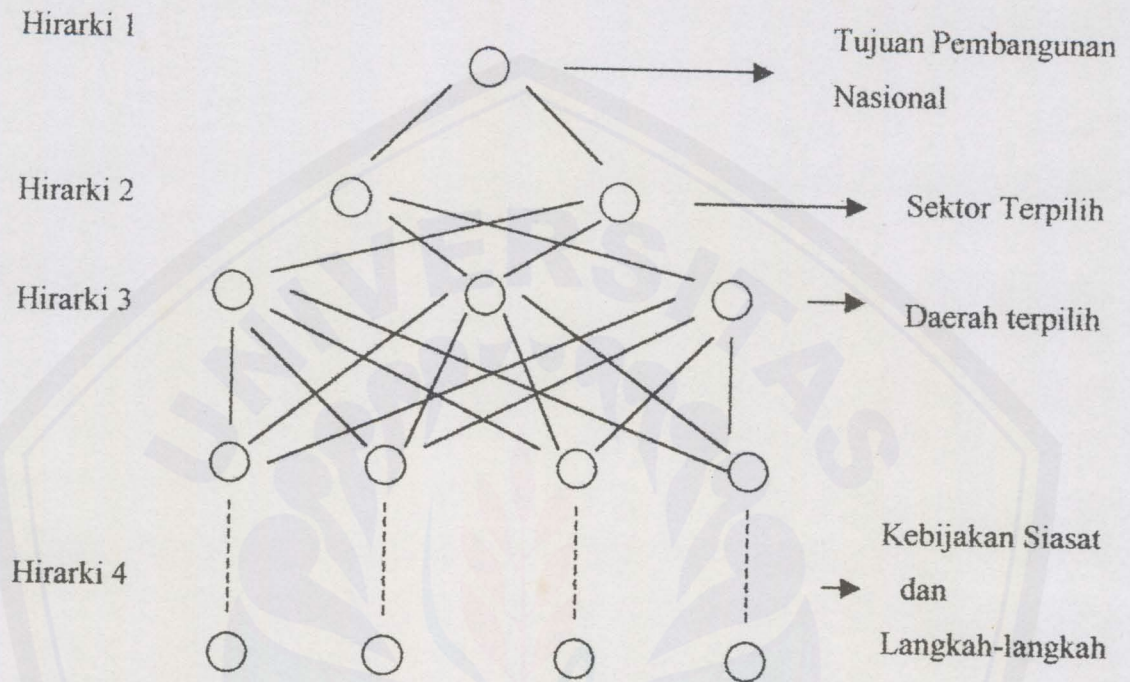
saling berbeda yaitu obyektif dan subyektif. Pandangan subyektif, memandang suatu daerah sebagai sarana untuk mencapai tujuan, hanya suatu ide, suatu model, untuk membantu mempelajari dunia. Daerah adalah suatu metode klasifikasi, suatu alat untuk memisahkan sifat-sifat areal dimana satu-satunya daerah alamiah (natural region) hanyalah permukaan bumi tempat manusia bermukim. Pandangan subyektif menganut posisi sebaliknya, memandang daerah sebagai tujuan tersendiri, suatu kebulatan riil, suatu organisme yang dapat diidentifikasi dan dipetakan.

Menurut Aziz (1994:229) pengamatan tentang pembangunan daerah tidak dapat dilepaskan dari sistem ekonomi dan politik dari negara yang bersangkutan. Pendekatan sektoral dalam suatu perencanaan selalu dimulai dengan pertanyaan yang menyangkut sektor apa yang perlu dikembangkan (hirarki 2) untuk mencapai tujuan pembangunan nasional (hirarki 1); pertanyaan dapat terbentuk: berapa banyak harus diproduksi, dengan cara atau teknologi apa, dan kapan produksi dimulai. Setelah hirarki tersebut selesai, baru muncul pertanyaan: dimana aktivitas tiap sektor dijalankan (hirarki 3), selanjutnya hirarki proses ditutup dengan pertanyaan standard menyangkut (hirarki 4): kebijakan apa, strategi apa, dan langkah-langkah apa yang perlu dilihat.

Berbeda dengan pendekatan sektoral, sesuai dengan namanya pendekatan regional lebih menitik beratkan pada pertanyaan: daerah mana yang perlu mendapatkan prioritas untuk dikembangkan, baru kemudian sektor apa yang sesuai untuk dikembangkan di masing-masing daerah. Jadi hirarki 2 dan 3 bertukar tempat.

Di dalam kenyataan, pendekatan regional sering diambil tidak dalam kerangka totalitas, melainkan untuk daerah tertentu, misal daerah terbelakang, daerah perbatasan, maupun daerah yang mempunyai posisi strategis dalam arti ekonomis dan strategis. Untuk Indonesia, yang diperlukan adalah gabungan dua pendekatan tersebut, bukan "sektoral" dan "regional", tetapi keduanya perlu berjalan bersama. Hal ini penting, tidak hanya terdiri dari segi konsep tetapi dari segi pelaksanaan khususnya yang menyangkut koordinasi pembangunan dalam kerangka sistem pemerintahan yang ada. Arah tersebut perlu dituju karena selama ini kecenderungan

selalu berat sebelah. Pendekatan sektoral kerap kali (kalau tidak selalu) mendominasi perencanaan (Aziz 1994:230)



Gambar 2.1. Hirarki Perencanaan Daerah

2.2.6 Indeks Williamson

Perkembangan pembangunan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain seharusnya sama. Tetapi pada kenyataannya perbedaan itu tidak hanya nampak jelas tetapi juga cenderung terus tumbuh. Ini dapat dilihat dari perbedaan pendapatannya. Perbedaan pendapatan regional bersifat relatif tidak absolut. Dimana untuk menghitung perbedaan tingkat pendapatan, membandingkan dalam bentuk relatif, pendapatan perkapita daerah diambil sebagai prosentase rata-rata pendapatan perkapita yaitu sebuah perbandingan dari rata-rata pendapatan regional dan bersifat informatif, daripada perbedaan absolut. Dengan menggunakan ukuran seperti indeks

Williamson ini akan dapat mengetahui perbedaan tingkat daerah selama proses pembangunan.

Penyebab dari disparitas atau perbedaan pendapatan ada beberapa faktor, yaitu ditentukan oleh produktivitas buruh, perbedaan sumber daya alam, kualitas buruh, efisiensi penggunaan sumber daya alam dan organisasi. Untuk mengukur disparitas pendapatan dapat digunakan ketimpangan regional dari JG Williamson.

Besar ukuran ketimpangan tergantung pada jumlah pembagian daerah dalam suatu negara dan sedikit perkecualian daerah dipengaruhi oleh sektor utama yang menonjol (Budiharsono 1989:82).

2.3 Hipotesa

Berdasarkan tujuan penelitian maka hipotesis yang diajukan adalah:

1. Interaksi yang tinggi dan semakin meningkat antara dua wilayah
2. Kesenjangan yang semakin menurun antara dua wilayah

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Rancangan Penelitian

3.1.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan ini adalah bersifat *explanatory* yaitu penelitian untuk mencari besarnya pengaruh, ada atau tidaknya, bagaimana pola hubungan dua atau lebih indikator (variabel), sehingga jenis penelitian ini bisa untuk menguji atau mengevaluasi teori yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini.

Dalam penelitian ini menggunakan alat analisis indeks Williamson untuk mengetahui besar pengaruh kota terhadap hinterland dan menurut Richardson (2001:92) model gravitasi untuk mengetahui pentingnya nodalitas dalam teori ekonomi regional adalah penitik beratan pada unsur dominannya satu atau beberapa titik ruang atas titik-titik lainnya dan menunjukkan pengaruh ini berkurang karena jarak.

3.1.2 Unit Analisis

Unit analisis dalam penelitian ini adalah gravitasi dan perilaku aktivitas sektor ekonomi di pusat pertumbuhan dilihat dari peranan pertumbuhan ekonomi di pusat pertumbuhan terhadap pertumbuhan ekonomi di Hinterland di kabupaten Ponorogo.

3.1.3 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kabupaten Ponorogo, dengan pertimbangan bahwa Kabupaten Ponorogo merupakan daerah yang cukup potensial baik dari segi sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang masih dapat dikembangkan, ditunjang dengan program otonomi sekarang ini menjadi daerah kota (simpul).

3.2 Populasi

Populasi yang diambil adalah sektor ekonomi di Kabupaten Ponorogo. Adapun waktu yang diambil adalah tahun 1996-2001, dengan alasan bahwa periode

tersebut merupakan suatu periode dengan beberapa kondisi yaitu kondisi normal, krisis, dan usaha perbaikan.

3.3 Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dilakukan dengan cara menyalin atau mengutip data yang sudah tersedia oleh pihak-pihak tertentu, dimana data-data diolah sesuai dengan analisis yang digunakan dalam penelitian ini. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang telah dikumpulkan oleh pihak yang berwenang dalam pengumpulan data. Data sekunder disusun tahun 1996 sampai dengan tahun 2001 yang diperlukan, diperoleh dengan mengambil dari studi pustaka juga mengambil dari instansi seperti BPS (Biro Pusat Statistik) dan dari Bappeda Kabupaten Ponorogo yaitu data *time series*.

3.4 Metode Analisa Data

3.4.1 Model Gravitasi

Menurut Richardson (2001:92) model gravitasi (*gravity model*) adalah suatu alat operasional yang sangat bermanfaat untuk memperkirakan nodalitas. Pentingnya nodalitas dalam teori ekonomi regional adalah penitik beratan pada unsur dominannya satu atau beberapa titik ruas atas titik lainnya dan menunjukkan bahwa pengaruh itu berkurang karena jarak.

Menurut Bintarto (1979:80) dalam memperbincangkan tentang model gravitasi dan interaksi ruang adalah terdapatnya dua wilayah yaitu wilayah *i* dan *j* yang dipisahkan oleh suatu jarak tertentu maka interaksi dalam ruang antara dua wilayah tersebut dapat diperkirakan dengan suatu model gravitasi sebagai berikut:

$$I_{ij} = \frac{aA_i A_j}{d_{ij}^b}$$

keterangan I_{ij}	=	taksiran tingkat interaksi antara pusat i dan pusat j
A_i, A_j	=	besarnya daya tarik pusat i dan j
d_{ij}	=	ukuran jarak antara I dan j
a	=	suatu bilangan konstanta
b	=	suatu eksponen jarak

Dalam hal ini nilai untuk konstanta a dan eksponen jarak (b) masing-masing diberi harga satu dan dua.

3.4.2. Indeks Williamson

Sedangkan untuk mengetahui kesenjangan tingkat pendapatan antara pusat pertumbuhan dengan daerah belakang digunakan analisis williamson. Indeks ini mengukur koefisien tertimbang suatu daerah tentang kesenjangan pendapatan dalam proses pembangunan (Budiharsono 1989:82)

$$V_w = \frac{\sqrt{\sum (Y_i - \bar{Y})^2 \frac{f_i}{n}}}{\bar{Y}}$$

keterangan :

V_w	=	indeks Williamson
Y_i	=	pendapatan perkapita wilayah I (wilayah kecamatan)
\bar{Y}	=	pendapatan perkapita rata-rata di pusat pertumbuhan (Rp)
f_i	=	jumlah penduduk wilayah i (wilayah hinterland) (orang)
n	=	jumlah penduduk wilayah pertumbuhan (orang)

Ketentuan :

1. Nilai indeks Williamson antara 0 – 1
2. Apabila V_w semakin mendekati 1 maka tingkat kesenjangan antar daerah semakin besar atau semakin tidak merata. Sebaliknya, apabila V_w semakin mendekati 0 menandakan kesenjangan antar daerah itu semakin kecil atau semakin merata.
3. Jika nilai indeks Williamson wilayah hinterland lebih besar daripada indeks Williamson wilayah pusat pertumbuhan berarti kesenjangan pendapatan wilayah hinterland lebih besar daripada kesenjangan pendapatan di wilayah pertumbuhan dan sebaliknya.

3.5 Definisi Operasional Variabel

Untuk menghindari salah pengertian dalam penulisan ini, serta mencegah meluasnya permasalahan, perlu adanya batasan-batasan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dan batasan-batasan pengertian variabel:

1. Kota yang dimaksud disini merupakan simpul atau sebagai kutub-kutub pertumbuhan adalah suatu tempat atau wilayah, dimana dari wilayah tersebut pembangunan akan menyebar melalui berbagai saluran dan mempunyai akibat akhir yang berlainan untuk perekonomian secara keseluruhan, dengan pusat pengembangan SSWP dengan angka 0-1.
2. Pembangunan wilayah adalah perubahan pembangunan suatu wilayah yang semakin meningkat ditinjau dari perekonomian secara keseluruhan.
3. Daerah hinterland adalah suatu daerah yang berada disekitar kutub-kutub pertumbuhan dimana perkembangannya sangat dipengaruhi oleh kota (kutub-kutub pertumbuhan). Daerah hinterland disini adalah kecamatan-kecamatan di sub wilayah pembangunan selain pusat sub wilayah pembangunan yang dinyatakan dengan SSWP.
4. Kontribusi kutub pertumbuhan yang dimaksud adalah sumbangan atau peranan kutub-kutub pertumbuhan bagi perkembangan wilayah hinterland ditinjau dari

tingkat pelayanan jasa dan sarana-sarana yang ada dinyatakan dengan PDRB tahun konstan.

5. Disparitas pendapatan adalah perbedaan pendapatan antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya, pada masing-masing sub wilayah pembangunan yang dinyatakan dengan Rupiah.



BAB IV
PEMBAHASAN



4.1 Gambaran Umum Daerah Penelitian

4.1.1 Keadaan dan Kondisi Geografis

Kabupaten Ponorogo mempunyai luas 1.371,78 km yang terletak antara $111^{\circ} 17'$ - $111^{\circ} 52'$ Bujur Timur dan $7^{\circ} 49'$ - $8^{\circ} 20'$ Lintang Selatan dengan ketinggian antara 92 sampai 2.563 meter diatas permukaan laut. Berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Madiun, Kabupaten Magetan, dan Kabupaten Nganjuk

Sebelah timur : Kabupaten Tulungagung dan Kabupaten Trenggalek

Sebelah selatan : Kabupaten Pacitan

Sebelah barat : Kabupaten Pacitan, dan Kabupaten Wonogiri (Jawa Tengah)

Jarak Ibu kota Ponorogo dengan Ibu Kota Propinsi Jawa Timur (Surabaya) kurang lebih 200 km arah Timur Laut dan ke Ibu Kota Negara (Jakarta) kurang lebih 800 km ke arah Barat.

Dilihat dari keadaan geografisnya, Kabupaten Ponorogo dibagi menjadi dua sub area, yaitu dataran tinggi yang meliputi kecamatan Ngrayun, kecamatan Sooko, kecamatan Pulung, dan kecamatan Ngebel sisanya merupakan daerah dataran rendah. Sungai yang melewati ada 14 sungai dengan panjang antara 4 km sampai 58 km sebagai sumber irigasi lahan pertanian. Kabupaten Ponorogo mempunyai dua iklim yaitu penghujan dan kemarau. Pada tahun 2001 ini bulan Maret mempunyai rata-rata curah hujan tertinggi sebesar 312 dengan hari hujan 18 dan bulan September mempunyai rata-rata curah hujan terendah sebesar 5 dengan hari hujan 1. Pada musim kemarau bulan terkering adalah bulan Juli dan Agustus.

4.1.2 Penduduk

Secara administratif wilayah Kabupaten Ponorogo terbagi menjadi 5 Pembantu Bupati, 20 kecamatan, 26 Kelurahan, dan 277 desa dengan 2.305 RW serta 6.452.

Penduduk yang ada yang merupakan obyek sekaligus subyek pembangunan, menurut hasil registrasi yang dilakukan penduduk kabupaten Ponorogo pada akhir tahun 2001, mengalami perkembangan sebesar 0,54 %. Diantara 20 kecamatan yang ada, kecamatan Ponorogo mempunyai jumlah penduduk yang paling banyak yaitu sebesar 75.646 jiwa atau sebesar 8,42 % dari total penduduk di kabupaten Ponorogo, disusul dengan kecamatan Babadan dan kecamatan Sawoo.

Secara keseluruhan penduduk wanita sedikit lebih banyak dibanding penduduk pria. *Sex ratio* atau perbandingan jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan akhir tahun 2000 menunjukkan kenaikan yaitu dari 96,34 % pada akhir tahun 2001 menjadi 96,43 % yang berarti penduduk dikabupaten Ponorogo penduduk perempuannya lebih banyak dibanding penduduk prianya, dimana setiap 100 penduduk wanita terdapat 96 penduduk pria, kondisi ini hampir merata diseluruh kecamatan kecuali kecamatan Mlarak.

Kepadatan penduduk kabupaten Ponorogo mengalami peningkatan dari 652 jiwa/km menjadi 655 jiwa/km dan kabupaten Ponorogo mempunyai kepadatan terbesar yaitu 3.391 jiwa/km, hal ini dimungkinkan karena kecamatan Ponorogo merupakan pusat pemerintahan dan sekaligus pusat perekonomian. Kepadatan terkecil di kecamatan Ngrayun yaitu sebesar 303 jiwa/km.

Tabel 4.1. Jumlah Penduduk Akhir Tahun Menurut jenis Kelamin, Sex Ratio dan Kecamatan Tahun 2001

Kecamatan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Sex Ratio
1. Ngrayun	27.960	28.081	6.041	99,57
2. Slahung	25.767	27.313	53.080	94,34
3. Bungkal	17.861	19.091	36.952	93,56
4. Sambit	18.852	19.740	38.592	95,50
5. Sawoo	29.977	31.097	61.074	96,40
6. Sooko	15.580	16.252	31.832	95,87
7. Pulung	24.370	25.397	49.767	95,96
8. Mlarak	18.927	17.236	36.163	109,81
9. Siman	19.216	19.926	39.142	96,44
10. Jetis	15.726	15.994	31.720	98,32
11. Balong	22.160	23.447	45.607	94,51
12. Kauman	21.509	21.786	43.295	98,73
13. Jambon	19.756	20.978	40.734	94,17
14. Badegan	14.786	15.521	20.307	95,26
15. Sampung	18.800	21.088	39.888	89,15
16. Sukorejo	25.503	26.777	52.280	95,24
17. Ponorogo	36.676	38.970	75.646	94,11
18. Babadan	30.806	31.219	62.025	98,68
19. Jenangan	26.784	27.310	54.094	98,07
20. Ngebel	10.098	10.470	20.568	96,45

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2001

Tabel 4.2. Luas Wilayah, penduduk, kepadatan tahun 2001

Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Rumah Tangga	Penduduk	Kepadatan	Rata-rata Anggota Rumah Tangga
1. Ngrayun	184,76	11.271	56.041	303	5
2. Slahung	90,34	14.458	53.080	588	4
3. Bungkal	54,01	9.582	36.952	684	4
4. Sambit	59,83	9.997	38.592	645	4
5. Sawoo	124,71	13.194	61.074	490	5
6. Sooko	104,24	8.670	31.832	305	4
7. Pulung	127,55	12.875	49.767	390	4
8. Mlarak	37,20	8.586	36.163	972	4
9. Siman	37,95	10.442	39.142	1.031	4
10. Jetis	22,41	7.702	31.720	1.415	4
11. Balong	56,96	11.092	45.607	801	4
12. Kauman	36,61	12.014	43.295	1.183	4
13. Jambon	57,48	9.316	40.734	709	4
14. Badegan	52,35	7.090	30.307	579	4
15. Sampung	80,61	10.473	39.888	495	4
16. Sukorejo	59,58	11.603	52.280	877	5
17. Ponorogo	22,31	17.096	75.646	3.391	4
18. Babadan	43,93	13.964	62.025	1.412	4
19. Jenangan	59,44	12.834	54.094	910	4
20. Ngebel	59,51	5.137	20.568	346	4
Jumlah 1999	1.371,78	206.409	889.412	655	4

Sumber: BPS Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

4.1.3 Penetapan Fungsi Kota dan Perwilayahan Pembangunan

Struktur kota-kota ini diarahkan dan diharapkan mencapai tujuan keseimbangan pembangunan antar wilayah. Dalam arti, adanya keseimbangan pembangunan antara perkembangan wilayah pusat dan wilayah pembangunan, sehingga wilayah belakang dapat berkembang akibat *multiplier effect* dari sistem kegiatan ekonomi yang terjadi pada pusat-pusat pengembangan.

Pengembangan fungsi-fungsi kota di kabupaten Ponorogo tergantung pada hirarki jumlah penduduk, hirarki fungsional, dan potensi sektoral. Dengan demikian kota-kota yang akan dikembangkan secara garis besar mempunyai fungsi utama:

1. Sebagai pusat kegiatan yang membentuk suatu wilayah pelayanan tertentu (regional beberapa kecamatan atau kecamatan) sesuai dengan struktur kota.
2. Sebagai simpul jasa distribusi yang mencakup kegiatan perhubungan dan komunikasi, pemasaran dan perdagangan (sistem koleksi dan distribusi).
3. Pemanfaatan fungsi kota yang mendukung pengembangan kegiatan yang ada diwilayah interlandnya.

Dalam jangka panjang kota-kota di kabupaten Ponorogo dapat diarahkan pada fungsi-fungsi sebagai berikut:

1. Kota Ponorogo

kota yang berperan sebagai pusat regional ini perlu dikembangkan dengan fungsi dasar sebagai berikut:

- a. Pusat pemasaran dan perdagangan sub regional atau sub satuan wilayah pembangunan
- b. Pusat agro-industri sub regional atau sub satuan wilayah
- c. Pusat industri kecil dan aneka industri
- d. Pemerintahan

4 Kota Kauman

Kota yang berperan sebagai salah satu pusat sub regional diarahkan untuk pengembangan fungsi dasar:

- a. Pertanian tanaman pangan

- b. Peternakan
- c. Pusat industri kecil
- d. Pusat agro-industri
- e. Hasil hutan

Kawaasan pertambangan: batu kapur

5 Kota Slahung

Kota yang berperan sebagai salah satu pusat sub regional diarahkan untuk pengembangan fungsi dasar:

- a. Pertanian tanaman pangan
- b. Peternakan
- c. Kehutanan
- d. Industri kecil
- e. Pusat perkebunan dan agro-industri sub satuan wilayah pembangunan
- f. Kawasan pertambangan: bahan galian kaolin, bentonit gibs dan pledsper

6 Kota Jetis

Kota yang berperan sebagai salah satu pusat sub regional diarahkan untuk pengembangan fungsi dasar:

- a. Pertanian tanaman pangan
- b. Peternakan
- c. Kehutanan
- d. Industri kecil

7 Kota Pulung

Kota yang berperan sebagai salah satu pusat sub regional diarahkan untuk pengembangan fungsi dasar:

- a. Pertanian tanaman pangan
- b. Hortikultura
- c. Peternakan dan perikanan
- d. Bahan galian (trass)
- e. Kehutanan

f. Pariwisata

Kegiatan atau sektor utama yang akan dikembangkan di masing-masing kota dan sekitarnya adalah: pasar induk sub satuan wilayah pembangunan, sarana dan prasarana perhubungan darat, komunikasi, dan kawasan pendidikan sub satuan wilayah pembangunan.

Setelah diketahui fungsi dari beberapa kota yang mempunyai pelayanan regional maupun sub regional, disusunlah konsep perwilayahan yang didasarkan atas:

1. Hubungan timbal balik yang terjadi antara pusat permukiman dan wilayah sekitarnya.

Hubungan antara kota (pusat permukiman) dan wilayah belakangnya (hinterlandnya) berkaitan dengan fenomena adanya hubungan timbal balik antara daerah pendukung dengan "pusat ikatan sosial ekonomi".

8 Homogenitas Wilayah

Kesamaan karakteristik daerah yang penerapannya dalam bentuk kesamaan geografis dan tingkat kesuburan tanah, mencerminkan adanya daerah-daerah yang mempunyai ciri dan sifat tertentu, sehingga penanganannya juga memerlukan pendekatan tertentu.

9 Ekologi Wilayah

Pendekatan ekologi lebih didasarkan pada sistem lingkungan alam

10 Perwilayahan Sektoral

Dalam penyelenggaraan pembangunan, beberapa sektor perlu penanganan (pengelolaan) yang bermatra geografis atau spatial karena kekhususan sektor yang bersangkutan dan adanya tuntutan efisiensi dan efektifitas penanganan.

Berdasarkan hal tersebut diatas, maka kabupaten Ponorogo terbagi menjadi lima Satuan Wilayah Pembangunan:

1. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) I yang meliputi kecamatan Ponorogo, Babadan, Jenangan, dan Siman dengan pusat pengembangan di kecamatan Ponorogo

2. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) II yang meliputi kecamatan Kauman, Sukorejo, Badegan, Jambon, dan Sampung dengan pusat pengembangan di kecamatan Kauman
3. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) III yang meliputi kecamatan Balong, Slahung, Bungkal, dan Ngrayun dengan pusat pengembangan di kecamatan Slahung
4. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) IV yang meliputi kecamatan Sambit, Jetis, Mlarak dan Sawoo dengan pusat pengembangan di kecamatan Jetis
5. Sub Satuan Wilayah Pembangunan (Sub SWP) V yang meliputi kecamatan Pulung, Sooko dan Ngebel dengan pusat pengembangan di kecamatan Pulung

4.2 Analisis Data

4.2.1 Analisis Indeks Gravitasi

Model Gravitasi menggunakan hukum Sir Isaac Newton tentang gravitasi yang mengatakan bahwa dua benda akan saling tarik menarik dengan gaya yang besarnya besarnya berbanding lurus dengan perkalian massa kedua benda tersebut dan berbanding terbalik dengan jarak berpangkat dua.

Analisis ini menganggap daerah sebagai suatu massa, hubungan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain dipersamakan dengan hubungan antara massa-massa wilayah yang mempunyai daya tarik sehingga saling mempengaruhi antar daerah sebagai perwujudan kekuatan tarik menarik atau interaksi antar daerah. Semakin besar fungsi suatu kecamatan yang ada maka semakin besar pula sarana yang ada, hal ini akan mengakibatkan aglomerasi atau pemusatan kegiatan ekonomi di tempat-tempat tertentu yang sarannya lebih lengkap.

Tabel 4.3 Hasil Analisis Indeks Gravitasi

Kota	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Ponorogo						
Babadan	123565329	124944960	125672322	127889458	128648441	130331754
Jenangan	12005392	12145131	12205973	12395332	12474835	12629613
Siman	175738075	177828100	178410868	181413012	182837774	185058483
Kauman						
Sukorejo	59977589	60624352	60921125	61875038	62402777	62873961
Badegan	7289540	7416074	7457724	7588576	7616158	7764151
Jambon	46997540	47356664	47530875	48218694	48675776	48999116
Sampang	46496312	46753372	46890813	47345817	47798843	47970860
Slahung						
Balong	28133000	28529967	28683918	29124732	29357612	29886661
Bungkal	29354160	29616416	29734403	30060485	30316798	30647065
Ngrayun	28024959	28406628	28595420	29057324	29258682	29746563
Jetis						
Sambit	32245412	32423592	32618592	33182024	33572578	34003840
Mlarak	43229942	43706544	44011004	44792756	45341904	45883614
Sawoo	10847312	10968481	11039158	11221824	11330698	11463120
Pulung						
Sooko	15033589	15122710	15161665	15443816	15696767	15841831
Ngebel	951776	959746	962079	978715	997754	999616

Keterangan: Lihat Lampiran 1 sampai 6

Hasil analisis indeks gravitasi memperlihatkan pusat sub wilayah pembangunan memiliki daya tarik yang kuat terhadap daerah belakangnya atau hinterlandnya. Kecamatan yang interaksinya paling kuat adalah kecamatan pusat sub wilayah pembangunan Ponorogo dengan Siman sebagai hinterlandnya dengan skala indeks 175738075, 1777828100, 178410868, 181413012, 182837774, 185058483 pada tahun 1996 hingga tahun 2001. Kecamatan terlemah interaksinya adalah pusat sub wilayah pembangunan Pulung dengan Ngebel sebagai Hinterlandnya yaitu 951776, 959746, 962079, 978715, 997754, 999616, pada tahun 1996 hingga 2001. Hasil analisis tersebut juga memperlihatkan adanya kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini mengindikasikan bahwa interaksi tersebut semakin kuat dari tahun ke tahun.

Beberapa hal yang menyebabkan interaksi antar wilayah itu kuat antara lain: pertama jumlah penduduk, kedua jarak antar wilayah, dan ketiga kemudahan transportasi. Secara keseluruhan kabupaten Ponorogo memiliki daya interaksi yang tinggi berdasarkan hasil analisis gravitasi yaitu dengan rata-rata delapan digit. Interaksi yang tinggi tersebut menggambarkan interaksi antar kawasan yang saling mempengaruhi dan terpengaruhi antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya.

4.2.2 Analisis Indeks Williamson

Kesenjangan pendapatan merupakan salah satu indikator tentang efektif atau tidaknya pusat sub wilayah pembangunan terhadap perkembangan daerah belakangnya atau hinterlandnya. Berdasarkan hasil perhitungan Indeks Williamson diantara pusat sub wilayah pembangunan di Kabupaten Ponorogo rata-rata mempunyai nilai angka yang kecil yaitu berkisar antara 0,03 hingga 0,32 pada tahun 1996 hingga tahun 2000, pada tahun 2001 mengalami penurunan kesenjangan yaitu berkisar antara 0,03 hingga 0,25.

Tingkat kesenjangan terjadi fluktuasi dari tahun ke tahun walaupun pada tahun terakhir mengalami penurunan yang cukup tajam. Nilai indeks tersebut walaupun berubah dari tahun ke tahun, akan tetapi secara umum mengalami penurunan pada tahun 2001. Kenaikan hanya terjadi di kecamatan Ponorogo meskipun nilainya cukup kecil yaitu 0,002. Kesenjangan-kesenjangan tersebut disebabkan karena, pertama adanya ketidak seimbangan potensi antara pusat sub wilayah pembangunan dengan daerah belakangnya, kedua ketidak seimbangan sumber daya manusia, ketiga keadaan alam yang memperlemah interaksi antar kawasan.

Tabel 4.4 Hasil Analisis Indeks Williamsom

Kota	1996	1997	1998	1999	2000	2001
Ponorogo	0,187590302	0,1872404	0,187186	0,187186	0,187315	0,1899
Kauman	0,325658300	0,3249809	0,325864	0,326037	0,324165	0,250214
Slahung	0,130126815	0,1321746	0,129653	0,204477	0,130158	0,109884
Jetis	0,196954809	0,1970973	0,197077	0,197152	0,248315	0,128918
Pulung	0,034354706	0,034395	0,031703	0,03423	0,045853	0,027967

Keterangan: lihat Lampiran 7 sampai 12

4.3 Pembahasan

Hasil analisis yang diungkapkan pada sub bab analisis memperlihatkan bahwa pusat sub wilayah pembangunan mampu memberikan pengaruh terhadap perkembangan dan pertumbuhan daerah belakangnya. Menurut Kadariah (1985:69) salah satu tujuan dari pembangunan adalah mengurangi perbedaan dalam tingkat perkembangan atau pembangunan dan kemakmuran antara daerah yang satu dengan daerah yang lain. Terbuktinya hipotesis yang diajukan bahwa terdapat suatu pengaruh dan korelasi serta signifikan antara pertumbuhan ekonomi di pusat sub wilayah pembangunan dengan wilayah belakangnya, hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Kadariah (1985:66) perkembangan kota beserta daerah kotanya dapat mempunyai pengaruh timbal balik terhadap terhadap daerah belakangnya atau hinterlandnya.

Perkembangan kota dengan wilayah belakangnya terjadi pula interaksi dalam ruang yang menggambarkan seberapa besar sarana dan prasarana maupun mobilitas penduduk. Berdasarkan hal tersebut analisis gravitasi yang berarti antara i dan j (atau pengaruh j terhadap i) adalah fungsi langsung dari besarnya i dan j serta fungsi sebaliknya dari jarak pangkat dua antara keduanya. Richardson (2001:94) jika dikuantitaskan menurut indikator sederhana seperti penduduk, jarak dapat diukur menurut jarak minimum. Menurut Budiharsono (1989:82) suatu hal yang wajar bila suatu daerah dalam suatu negara terdapat suatu wilayah yang terbelakang jika dibanding dengan wilayah yang lainnya. Faktor-faktor yang menyebabkan hal tersebut adalah struktur ekonomi dan distribusi spasial dari sumberdaya bawaan. Selanjutnya dikemukakan dalam Hirschman (dalam Arsyad 1999:129) daerah disuatu

negara dapat dibedakan menjadi dua yaitu kaya dan miskin. Jika perbedaan kedua daerah tersebut semakin menyempit maka terjadi imbas yang baik karena terjadi proses menetes ke bawah atau *trickling down effects*.

Indeks gravitasi mensyaratkan bahwa semakin besar angka indeks maka semakin besar pula tingkat interaksi. Variabel jumlah penduduk juga berpengaruh sangat signifikan terhadap kuat atau lemahnya interaksi antar wilayah. Estimasi interaksi antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya nampak pada perhitungan analisis indeks gravitasi Ponorogo dengan Siman kemudian berturut-turut Jetis dengan Mlarak, Slahung dengan Bungkal, yang terakhir adalah Pulung dengan Sooko selama 1996 sampai 2001. Model gravitasi ini selain studi tentang mobilitas penduduk juga dapat digunakan untuk sarana perhubungan yaitu untuk tempat-tempat dengan interaksi yang rendah. Hal ini menjelaskan secara relatif tentang besarnya kota dan pertumbuhan kota dimana perkembangan kota beserta daerah kota dapat mempunyai pengaruh timbal balik terhadap daerah belakangnya. Indeks gravitasi tersebut dapat dikatakan bahwa kecamatan pusat sub wilayah pembangunan dikabupaten Ponorogo mempunyai pengaruh terhadap daerah belakangnya.

Kesenjangan merupakan salah satu indikator intensitas keruangan, besar kecilnya kesenjangan antar kawasan mampu memperlihatkan tingkat intensitas pengaruh suatu kawasan. Hal ini berkorelasi dengan kutub pertumbuhan, dimana menurut Hirschman (dalam Salim 1991:35) berpendapat bahwa kemajuan ekonomi tidak terjadi di berbagai tempat pada waktu yang sama dan apabila di suatu daerah atau wilayah terjadi pembangunan maka akan terdapat daya tarik yang kuat yang akan menciptakan konsentrasi pembangunan ekonomi di sekitar wilayah pembangunan tersebut bermula.

Hasil analisis Williamson di Kabupaten Ponorogo memperlihatkan adanya kesenjangan pendapatan walaupun sangat kecil. Kesenjangan tersebut merupakan salah satu indikator dari interaksi keruangan. Hal ini membuktikan teori dari Perroux, berpendapat bahwa pertumbuhan tidak terjadi di sembarang tempat dan juga tidak

terjadi secara serentak, tetapi pertumbuhan terjadi pada titik-titik atau kutub-kutub perkembangan dengan intensitas yang berubah-ubah, lalu pertumbuhan itu menyebar sepanjang saluran yang beraneka ragam dan dengan pengaruh yang beraneka ragam terhadap keseluruhan ekonomi.

Teori dari Perroux mengenai pertumbuhan yang tidak terjadi di sembarang tempat, besarnya kota juga akan mempengaruhi. Besarnya kota ini akan semakin bertambah dengan bertambahnya fungsi kota. Ibu kota nasional memberikan jasa perbankan untuk transaksi internasional kepada semua daerah di wilayah nasional, jika kita melihat kedalam cakupan regional maka akan terlihat bahwa daerah –daerah pusat sub wilayah pembangunan jasa perbankan maupun jasa-jasa yang lainnya bagi masing-masing daerah belakangnya. Jika daerah atau kota-kota tersebut disusun mulai dari tingkat yang trkecil hingga yang terbesar, maka terdapatlah suatu hierarki kota-kota.

Pusat sub wilayah pembangunan Ponorogo yang mengalami pelebaran kesenjangan di tahun 2001 sebesar 0,002 jika dibandingkan dengan pusat sub wilayah pembangunan-pusat sub wilayah pembangunan yang lain yang secara umum mengalami penurunan. Pelebaran kesenjangan ini disebabkan karena Ponorogo selain sebagai pusat sub wilayah pembangunan juga sebagai pusat kabupaten sehingga terjadi penambahan besarnya kota.

Perkembangan daerah tersebut akan membawa pengaruh terhadap daerah yang lain dalam hal ini pengaruh antara pengaruh antara pusat sub wilayah pembangunan dengan daerah belakangnya. Pengaruh atau dampak tersebut ada dua yaitu dampak balik atau dampak sebar yang keduanya tidak dapat berjalan secara bersamaan. Kedua dampak tersebut merupakan akibat dari pembangunan yang dilaksanakan. Pertama, dampak sebar yaitu suatu dampak dimana pembangunan di pusat memberikan suatu kontribusi atau pengaruh terhadap daerah belakangnya. Dalam konteks ini ditandai dengan kecilnya angka indeks. Kecilnya indeks Williamson ini menandakan kecilnya kesenjangan antara pusat sub wilayah pembangunan dengan daerah belakangnya. Kedua, dampak balik dimana

pembangunan di pusat sub wilayah pembangunan menyerap seluruh sumber daya daerah belakangnya. Penyerapan sumber daya tersebut biasanya melalui ekspansi ekonomi. Adanya ekspansi ekonomi menyebabkan pengaruh yang merugikan bagi daerah yang lainnya karena perpindahan tenaga kerja, modal dari daerah belakang ke pusat sub wilayah pembangunan sementara pendapatan tenaga kerja tersebut dibelanjakan kembali di pusat sub wilayah pembangunan sehingga mendorong naiknya investasi yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan. Sebaliknya di daerah belakangnya kurang berkembang sebagai akibat rendahnya investasi yang berujung pada rendahnya pendapatan masyarakat. Akibat-akibat yang dirimbulkan oleh ekspansi ekonomi tersebut disebut juga *backwash effect*. Jika kejadian tersebut berlangsung secara terus menerus dan perbedaan tersebut semakin jauh berarti terjadi proses pengutuban atau *polarization effect*, dalam hubungannya dengan tingkat kesenjangan ini adalah semakin tinggi angka indeks maka semakin tinggi kesenjangan dan sebaliknya.

Secara umum terjadi diseluruh sub wilayah pembangunan di kabupaten Ponorogo. Kesenjangan terjadi paling tinggi terjadi di pusat sub wilayah pembangunan Kauman dengan angka indeks pada tahun 1996 sebesar 0,325658300 sekalipun mengalami penurunan pada tahun 2001 sebesar 0,250214 tetap merupakan tertinggi. Angka indeks Williamson terendah adalah pusat sub wilayah pembangunan Pulungyang pada tahun 1996 dengan nilai 0,034354706 yang dipertahankan hingga tahun 2001 yaitu sebesar 0,027967. Kesenjangan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan potensi dan sumber daya pada masing-masing pusat sub wilayah pembangunan dengan daerah belakangnya.



BAB V SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan:

1. Interaksi yang tinggi antara wilayah yang satu dengan yang lain, dalam hal ini adalah antara pusat sub wilayah dengan hinterlandnya ditunjukkan dengan besarnya nilai indeks gravitasi yang semakin meningkat dari tahun ke tahun yaitu pada tahun 1996 dengan rata-rata 49531120,15 sementara nilai tertinggi adalah 175738075 dan terendah adalah 951776, pada tahun 1997 dengan rata-rata 50055406,23 sementara nilai tertinggi adalah 177828100 dan terendah adalah 959746, pada tahun 1998 dengan rata-rata 50290168,85 sementara nilai tertinggi adalah 17841868 dan terendah adalah 11039158, pada tahun 1999 dengan rata-rata 51089620,92 sementara nilai tertinggi adalah 181413012 dan terendah adalah 11221824, pada tahun 2000 dengan rata-rata 51510221,23 sementara nilai tertinggi adalah 182837774 dan terendah adalah 11330698, dan pada tahun 2001 dengan rata-rata 52096830,85 sementara nilai tertinggi adalah 185058483 dan terendah adalah 999616. Sehingga dengan demikian terjadi peningkatan interaksi dari tahun ke tahun. Semakin dekat jarak antara pusat sub wilayah pembangunan dengan daerah belakangnya dan semakin besar jumlah penduduk maka nilai gravitasi akan semakin besar (kecamatan Ponorogo terhadap kecamatan Babadan dan kecamatan Siman). Semakin besar nilai gravitasi dari hinterland ke pusat sub wilayah pembangunan menunjukkan sarana-sarana yang ada di pusat sub wilayah pembangunan digunakan oleh hinterlandnya dan semakin besar fungsi pusat pelayanan bagi daerah belakangnya.
2. Kecilnya tingkat kesenjangan antara pusat sub wilayah pembangunan dengan hinterlandnya ditunjukkan dengan kecilnya indeks williamson yang berkisar antara 0,034354706-0,3256583 pada tahun 1996, 0,034395-0,3249809 pada tahun 1997, 0,031703-0,325864 pada tahun 1998, 0,03423-0,326037 pada tahun

1999, 0,045853-0,324165 pada tahun 2000, 0,027697-0,250214 pada tahun 2001.

Menunjukkan bahwa kabupaten

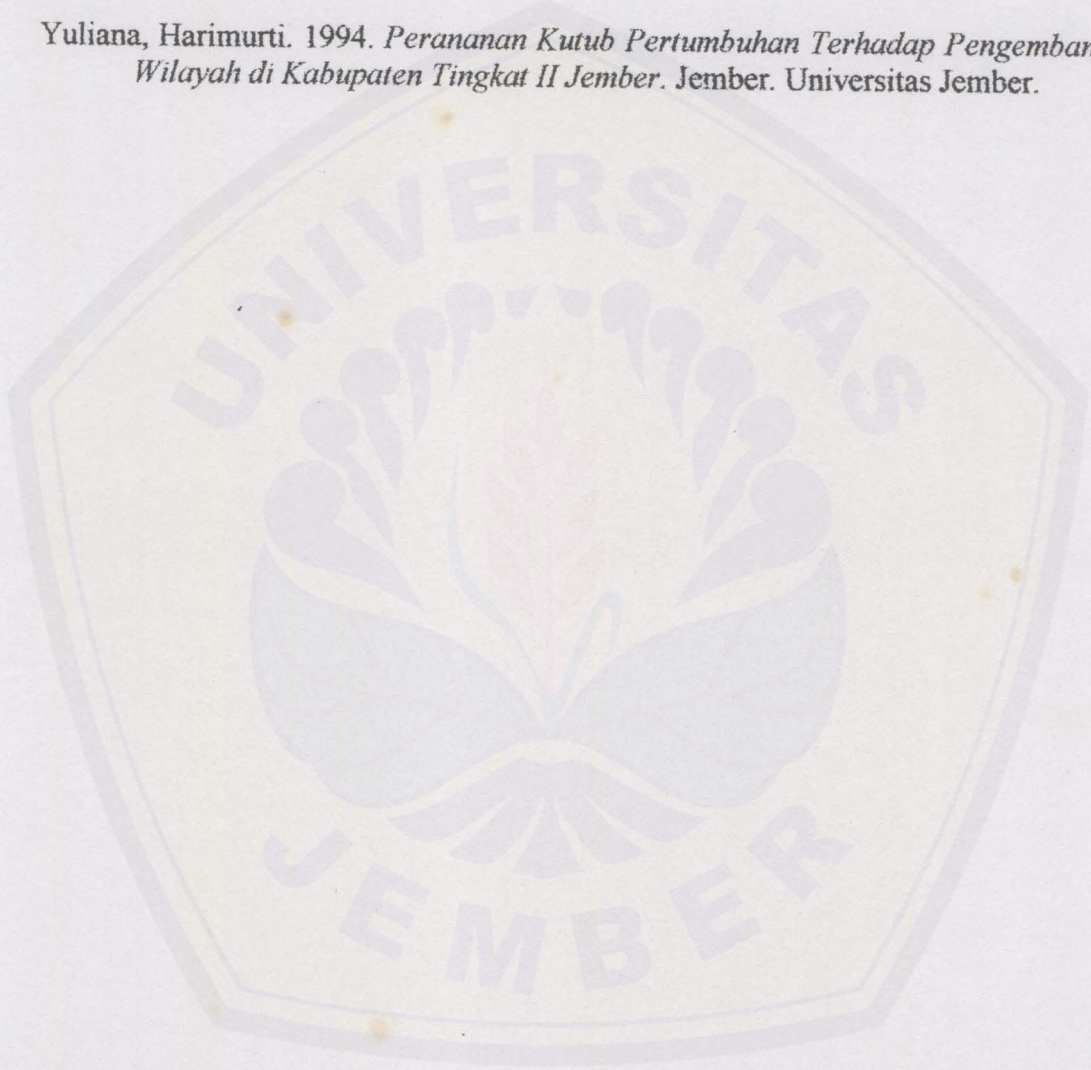
5.2 Saran

1. Kebijakan pengembangan wilayah dikabupaten Ponorogo hendaknya ditujukan untuk mendorong pertumbuhan hinterland melalui peningkatan sarana maupun prasarana untuk memudahkan perhubungan sehingga akan memacu kegiatan ekonomi.
2. Kebijaksanaan pengembangan wilayah di kabupaten Ponorogo hendaknya jangan dikonsentrasikan hanya pada kecamatan yang maju atau pada pusat sub wilayah pembangunan saja, sebab akan mempertajam ketimpangan antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arsyad, Lincolin. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi Daerah*. Yogyakarta. BPFE
- Basri, Faisal. 1995. *Perekonomian Indonesia Menjelang Abad XXI*. Jakarta. Erlangga.
- Bappeda. Kabupaten Ponorogo. *Revisi Rencana Tata Ruang Rencana Wilayah Kabupaten Ponorogo 1999/2000 – 2009/2010*. tidak dipublikasikan.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo 1997. *Ponorogo Dalam Angka 1996*. Ponorogo.
- Bintarto, R dan Surastopo Hadisumarno. 1979. *Metode Analisa Geografi*. Jakarta LP3ES.
- Budiharsono, Sugeng. 1989. *Perencanaan Pembangunan Wilayah*. Jakarta. LPFEUI.
- Glasson, John. 1977. *Pengantar Perencanaan Regional*. Jakarta. LPFEUI.
- Hadjisaroso, Poernomosidi. 1980. *Konsepsi Dasar Pengembangan Wilayah*. Jakarta. DPU.
- Hill, Hal. 2001. *Ekonomi Indonesia*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Irawan, dan suparmoko. 1987. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. Liberty.
- Iwan, I.J. 1994. *Ilmu Ekonomi Regional dan Beberapa Aplikasinya di Indonesia*. Jakarta. LPFEUI.
- Jhingan. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta. Raja Grafindo.
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*. Jakarta. LPFEUI.
- Kuncoro, Mudrajad. 2000. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta. YKPN.
- Richardson, Harry. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Ekonomi Regional*. Jakarta LPFEUI.
- Sanusi, Bachrawi. 2000. *Pengantar Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. LPFEUI.
- Salim, Emil Et al. 2002. *80 Th Mohammada Sadli "Ekonomi Indonesia di Era Politik Baru"*. Jakarta. Kompas.
- Sukirno, Sadono. 1985. *Ekonomi Pembangunan Proses, Masalah, Dasar Kebijakan*. Jakarta. LPFEUI.
- Spillane, James. 1993. *Ekonomi Regional*. Jakarta. Universitas Terbuka.

- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1984. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta. Gunung Agung.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta. Bumi Aksara.
- Yudhoyono, Bambang et al. 2000. *Otonomi atau Federalisme*. Jakarta. Pustaka Harapan.
- Yuliana, Harimurti. 1994. *Peranan Kutub Pertumbuhan Terhadap Pengembangan Wilayah di Kabupaten Tingkat II Jember*. Jember. Universitas Jember.



Lampiran 1

Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 1996

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		73958				
Ponorogo-Babadan	6		60147	4448351826	36	123565329
Ponorogo-Jenangan	18		52594	3889747052	324	12005392
Ponorogo-Siman	4		38019	2811809202	16	175738075
Kauman		42457				
Kauman-Sukorejo	6		50856	2159193192	36	59977589
Kauman-Badegan	13		29016	1231932312	169	7289540,3
Kauman-Jambon	6		39850	1691911450	36	46997540
Kauman-Sampung	6		39425	1673867225	36	46496312
Slahung		51421				
Slahung-Balong	9		44316	2278773036	81	28133000
Slahung-Bungkal	8		36535	1878666235	64	29354160
Slahung-Ngrayun	10		54501	2802495921	100	28024959
Jetis		30838				
Jetis-Sambit	6		37643	1160834834	36	32245412
Jetis-Mlarak	5		35046	1080748548	25	43229942
Jetis-Sawoo	13		59446	1833195748	169	10847312
Pulung		48146				
Pulung-Sooko	10		31225	1503358850	100	15033589
Pulung-Ngebel	32		20243	974619478	1024	951776,83

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

Lampiran 2
Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 1997

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		74372				
Ponorogo-Babadan	6		60480	4498018560	36	124944960
Ponorogo-Jenangan	18		52910	3935022520	324	12145131
Ponorogo-Siman	4		38257	2845249604	16	177828100
Kauman		42669				
Kauman-Sukorejo	6		51149	2182476681	36	60624352
Kauman-Badegan	13		29373	1253316537	169	7416074,2
Kauman-Jambon	6		39955	1704839895	36	47356664
Kauman-Sampung	6		39446	1683121374	36	46753372
Slahung		51818				
Slahung-Balong	9		44597	2310927346	81	28529967
Slahung-Bungkal	8		36579	1895450622	64	29616416
Slahung-Ngrayun	10		54820	2840662760	100	28406628
Jetis		30987				
Jetis-Sambit	6		37669	1167249303	36	32423592
Jetis-Mlarak	5		35262	1092663594	25	43706544
Jetis-Sawoo	13		59821	1853673327	169	10968481
Pulung		48320				
Pulung-Sooko	10		31297	1512271040	100	15122710
Pulung-Ngebel	32		20339	982780480	1024	959746,56

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

Lampiran 3
Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 1998

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		74567				
Ponorogo-Babadan	6		60673	4524203591	36	125672322
Ponorogo-Jenangan	18		53036	3954735412	324	12205973
Ponorogo-Siman	4		38282	2854573894	16	178410868
Kauman		42750				
Kauman-Sukorejo	6		51302	2193160500	36	60921125
Kauman-Badegan	13		29482	1260355500	169	7457724,9
Kauman-Jambon	6		40026	1711111500	36	47530875
Kauman-Sampung	6		39487	1688069250	36	46890813
Slahung		51952				
Slahung-Balong	9		44722	2323397344	81	28683918
Slahung-Bungkal	8		36630	1903001760	64	29734403
Slahung-Ngrayun	10		55042	2859541984	100	28595420
Jetis		31090				
Jetis-Sambit	6		37770	1174269300	36	32618592
Jetis-Mlarak	5		35390	1100275100	25	44011004
Jetis-Sawoo	13		60007	1865617630	169	11039158
Pulung		48378				
Pulung-Sooko	10		31340	1516166520	100	15161665
Pulung-Ngebel	32		20364	985169592	1024	962079,68

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

Lampiran 4
Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 1999

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		75164				
Ponorogo-Babadan	6		61253	4604020492	36	127889458
Ponorogo-Jenangan	18		53431	4016087684	324	12395332
Ponorogo-Siman	4		38617	2902608188	16	181413012
Kauman		43046				
Kauman-Sukorejo	6		51747	2227501362	36	61875038
Kauman-Badegan	13		29793	1282469478	169	7588576,8
Kauman-Jambon	6		40326	1735872996	36	48218694
Kauman-Sampung	6		39596	1704449416	36	47345817
Slahung		52299				
Slahung-Balong	9		45108	2359103292	81	29124732
Slahung-Bungkal	8		36786	1923871014	64	30060485
Slahung-Ngrayun	10		55560	2905732440	100	29057324
Jetis		31335				
Jetis-Sambit	6		38122	1194552870	36	33182024
Jetis-Mlarak	5		35737	1119818895	25	44792756
Jetis-Sawoo	13		60523	1896488205	169	11221824
Pulung		48986				
Pulung-Sooko	10		31527	1544381622	100	15443816
Pulung-Ngebel	32		20459	1002204574	1024	978715,4

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

Lampiran 5
Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 2000

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		75364				
Ponorogo-Babadan	6		61453	4631343892	36	128648441
Ponorogo-Jenangan	18		53631	4041846684	324	12474835
Ponorogo-Siman	4		38817	2925404388	16	182837774
Kauman		43246				
Kauman-Sukorejo	6		51947	2246499962	36	62402777
Kauman-Badegan	13		29763	1287130698	169	7616158
Kauman-Jambon	6		40520	1752327920	36	48675776
Kauman-Sampung	6		39790	1720758340	36	47798843
Slahung		52481				
Slahung-Balong	9		45311	2377966591	81	29357612
Slahung-Bungkal	8		36971	1940275051	64	30316798
Slahung-Ngrayun	10		55751	2925868231	100	29258682
Jetis		31540				
Jetis-Sambit	6		38320	1208612800	36	33572578
Jetis-Mlarak	5		35940	1133547600	25	45341904
Jetis-Sawoo	13		60713	1914888020	169	11330698
Pulung		49501				
Pulung-Sooko	10		31710	1569676710	100	15696767
Pulung-Ngebel	32		20640	1021700640	1024	997754,53

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

lampiran 6
Hasil Perhitungan Indeks Gravitasi Tahun 2001

Kota	Jarak	Jml Penddk 1	Jml Penddk 2	P1.P2	J2	I
Ponorogo		75646				
Ponorogo-Babadan	6		62025	4691943150	36	130331754
Ponorogo-Jenangan	18		54094	4091994724	324	12629613
Ponorogo-Siman	4		39142	2960935732	16	185058483
Kauman		43295				
Kauman-Sukorejo	6		52280	2263462600	36	62873961
Kauman-Badegan	13		30307	1312141565	169	7764151,3
Kauman-Jambon	6		40743	1763968185	36	48999116
Kauman-Sampung	6		39888	1726950960	36	47970860
Slahung		53080				
Slahung-Balong	9		45607	2420819560	81	29886661
Slahung-Bungkal	8		36952	1961412160	64	30647065
Slahung-Ngrayun	10		56041	2974656280	100	29746563
Jetis		31720				
Jetis-Sambit	6		38592	1224138240	36	34003840
Jetis-Mlarak	5		36163	1147090360	25	45883614
Jetis-Sawoo	13		61074	1937267280	169	11463120
Pulung		49767				
Pulung-Sooko	10		31832	1584183144	100	15841831
Pulung-Ngebel	32		20568	1023607656	1024	999616,85

Sumber: Badan Pusat Statistik, diolah 2003

Lampiran 7 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 1996

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita	Jml Pnddk (Jiwa)	$(y_i - \bar{y})^2$	f_i/n	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n}$	V
SWP I								
Ponorogo	954010,66	73958				32027808309	178963	0,187590302
Babadan	887452,48	60147	4429991325	0,81325888	3602729769			
Jenangan	784028,25	52594	28894019709	0,71113335	20547500914			
Siman	830219,8	38019	15324177020	0,51406204	7877577627			
SWP II								
Kauman	827570,8	42457				72633123066	269505	0,3256588337
Sukorejo	717235,2	50856	12173944627	1,19782368	14582239159			
Badegan	655365,68	29016	29654603354	0,68342087	20266574909			
Jambon	653168,04	39850	30416322696	0,9385967	28548660042			
Sampung	727841,56	39425	9945921311	0,92858657	9235648955			
SWP III								
Slahung	764307,92	51421				9891685940	99457	0,130126815
Balong	730134,26	44316	1167839038	0,86182588	1006475074			
Bungkal	811769	36535	2252554115	0,71050738	1600456323			
Ngrayun	681403,92	54501	6873073216	1,05989771	7284754543			
SWP IV								
Jetis	815603,05	30838				25804227324	160637	0,196954809
Sambit	807540,8	37643	64999875,06	1,2206693	79343352			
Mlarak	787505,8	35046	789455457,6	1,13645502	897180620			
Sawoo	702115,02	59446	12879532953	1,92768662	24827703351			
SWP V								
Pulung	729580,8	48146				628230852	25065	0,034354706
Sooko	705727,5	31225	568979920,9	0,64854817	369010884			
Ngebel	704750,79	20243	616529396,6	0,4204503	259219968			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

Lampiran 8 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 1997

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita (Jiwa)	Jml Penddk	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i / n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i / n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i / n}$	V	W	
SWP I								
Ponorogo	98812,46	74372						
Babadan	919673,27	60480	4711338404	0,81320927	3831304075	34244256374	185052	0,187240417
Jenangan	812494,01	52910	30912127360	0,71142365	21991618602			
Siman	860362,63	38257	16371158997	0,51440058	8421333697			
SWP II								
Kauman	857617,46	42669						
Sukorejo	743275,9	51149	13073992343	1,19873913	15672306226	77678896628	278709	0,324980955
Badegan	679160,08	29373	31847036476	0,688839204	21923246442			
Jambon	676882,65	39955	32665071546	0,9363941	30587380384			
Sampung	756267,34	39446	10271846824	0,92446507	9495963576			
SWP III								
Slahung	792057,69	51818						
Balong	756643,28	44597	1254180436	0,86064688	1079406478	10959986962	104690	0,132174661
Bungkal	841241,95	36579	2419091432	0,705913	1707668098			
Ngrayun	704163,69	54820	7725355236	1,05793354	8172912386			
SWP IV								
Jetis	845215,2	30987						
Sambit	836860,13	37669	69807194,7	1,21563882	84860336	27752107941	166590	0,197097307
Miarak	816097,82	35262	847821818,1	1,13796108	964788232			
Sawoo	727606,74	59821	13831749864	1,93051925	26702459373			
SWP V								
Pulung	756069,73	48320						
Sooko	731350,39	31297	611045770	0,64770281	395776065	674473873	25971	0,034349523

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

Lampiran 9 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 1998

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita	Jml Penddk (Jiwa)	$(y_i - \bar{y})^2$	f_i/n	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n}$	V
SWP I								
Ponorogo	989301,76	74567						
Babadan	920593,86	60673	4720775522	0,81367093	3841157795	34293171354	185184	0,187186724
Jenangan	813307,32	53036	30974042911	0,71125297	22030379924			
Siman	861223,86	38282	16403948468	0,51339064	8421633635			
SWP II								
Kauman	858475,94	42750						
Sukorejo	744019,92	51302	13100180514	1,20004678	15720829491	78258404711	279747	0,325864738
Badegan	679839,92	29482	31910827641	0,68963743	22006901065			
Jambon	677560,21	40026	32730501361	0,9362807	30644936783			
Sampung	755022,36	39487	10702643215	0,92367251	9885737371			
SWP III								
Slahung	792441,9	51952						
Balong	757400,68	44722	1227887099	0,86083308	1057005829	10556157937	102743	0,129653877
Bungkal	842084,03	36630	2464341071	0,70507391	1737542605			
Ngrayun	706850,54	55042	7325880907	1,05947798	7761609502			
SWP IV								
Jetis	846061,26	31090						
Sambit	837697,83	37770	69946961,36	1,21486008	84975771	27802207804	166740	0,197077858
Mlarak	816914,73	35390	849520211	1,13830814	967015769			
Sawoo	728335,08	60007	13859453457	1,93010614	26750216263			
SWP V								
Pulung	754826,56	48378						
Sooko	732082,47	31340	517293629,9	0,64781512	335110636	572668943	23931	0,031703899
Ngebel	731069,28	20364	564408353	0,42093514	237579307			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

Lampiran 10 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 1999

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita	Jml Penddk (jiwa)	f_i/n	$(y_i - \bar{y})^2$	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n}$	V	w
SWP I									
Ponorogo	917082,73	75164							
Babadan	853390,51	61253	0,8149247	4056698889	3305904117	29469058474	171666	0,1871865339	
Jenangan	753935,89	53431	0,71085892	26616891402	18920854724				
Siman	798354,52	38617	0,51376989	14096387850	7242299633				
SWP II									
Kauman	795807,2	43046							
Sukorejo	689706,47	51747	1,2021326	11257364907	13532845370	67321089073	259463	0,326037611	
Badegan	630211,61	29793	0,69212006	27421899427	18979246612				
Jambon	628098,31	40326	0,93681178	28126271785	26349022813				
Sampung	699905,73	39596	0,91985318	9197091948	8459974278				
SWP III									
Slahung	792850,54	52299							
Balong	702110,43	45108	0,86250215	8233767563	7101642235	27321360533	165292	0,208477809	
Bungkal	780611,9	36786	0,70337865	149784309	105355085				
Ngrayun	655250,45	55560	1,06235301	18933784768	20114363214				
SWP IV									
Jetis	784298,79	31335							
Sambit	776545,89	38122	1,21659486	60107458	73126425	23909326080	154626	0,197152425	
Mlarak	757279,95	35737	1,14048189	730017715	832571983				
Sawoo	675166,62	60523	1,93148237	11909830529	23003627672				
SWP V									
Pulung	701578,14	48986							
Sooko	678640,45	31527	0,64359205	526137623	33861989	576723273	24015	0,034230062	
Ngebel	677701,22	20459	0,41764994	570107309	238105284				

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

Lampiran 11 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 2000

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita	Jml Penddk (Jiwa)	$(y_i - \bar{y})^2$	f_i/n	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n}$	V
SWP I								
Ponorogo	930932,96	75364						
Babadan	866278,82	61453	4180157819	0,81541585	3408566935	30407588391	174378	0,187315011
Jenangan	765322,82	53631	27426718471	0,71162624	19517572559			
Siman	810411,65	38817	14525386164	0,51506024	7481448898			
SWP II								
Kauman	807825,86	43246						
Sukorejo	700122,27	51947	11600063299	1,2011978	13933970499	68575690353	261870	0,324166911
Badegan	639729,27	29763	28256463570	0,6882255	19446818786			
Jambon	639729,36	40520	28256433312	0,93696527	26475296624			
Sampung	710476,21	39790	9476954355	0,92008509	8719604444			
SWP III								
Slahung	746072,36	52481						
Balong	712714,06	45311	1112776179	0,86337913	960747727	9429849990	97107	0,130158172
Bungkal	792401,07	36971	2146349370	0,70446447	1512026878			
Ngrayun	665146,36	55751	6549017476	1,06230826	6957075385			
SWP IV								
Jetis	796143,65	31540						
Sambit	788273,66	38320	61936743	1,21496512	75250982	39083258897	197695	0,248315669
Mlarak	768716,76	35940	752234295	1,13950539	857175034			
Sawoo	655363,31	60713	19819104131	1,92495244	38150832881			
SWP V								
Pulung	720642,79	49501						
Sooko	688889,6	31710	1008265075	0,64059312	645887670	1091920185	33044	0,045853807
Ngebel	687936,19	20640	1069721684	0,41696127	446032515			

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

Lampiran 12 Perhitungan Nilai Indeks Williamson Antara Pusat dan Wilayah Hinterland di Kabupaten Ponorogo Tahun 2001

Satuan Wilayah Pembangunan (Kecamatan)	Perkapita	Jml Penddk (Jiwa)	$(y_i - \bar{y})^2$ f_i/n	$(y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n$	$\sqrt{\sum (y_i - \bar{y})^2 \cdot f_i/n}$	V w
SWP I							
Ponorogo	950718,99	75646			32595323174	180542	0,189900224
Babadan	884699,7	62025	4358546652	0,83865167	3655302416		
Jenangan	781588,33	54094	28605180152	0,73141513	20922261488		
Siman	827636,13	39142	15149390426	0,52924633	8017759269		
SWP II							
Kauman	824995,38	43295			42611543440	206426	0,250214294
Sukorejo	715003,14	52280	12098292860	0,70688769	8552134329		
Badegan	653326,16	30307	29470321095	0,40978664	12076543733		
Jambon	651135,36	40743	30227306554	0,55089375	16652034275		
Sampung	725576,49	39888	9884115689	0,53933314	5330831101		
SWP III							
Slahung	761929,37	53080			7009790337	83724	0,109884845
Balong	727862,05	45607	1160582292	0,61666081	715685613		
Bungkal	809242,75	36952	2238555927	0,49963493	1118460729		
Ngrayun	679283,37	56041	6830361316	0,75774088	5175643994		
SWP IV							
Jetis	813064,87	31720			10987047375	104819	0,126918517
Sambit	805027,61	38592	64597548	0,52180968	33707626		
Mlarak	785055,56	36163	784521447	0,48896671	383604871		
Sawoo	699930,01	61074	12799496547	0,82579302	10569734878		
SWP V							
Pulung	727310,32	49767			413764489		
Sooko	703531,25	31832	565444170	0,43040645	243370816		
Ngebel	702557,58	20568	612698138	0,27810379	170393673		

Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Ponorogo, diolah 2003

